

**PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN BIDANG HUBUNGAN
MASYARAKAT DI SMP NEGERI KECAMATAN PADANG UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Strata Satu (S1) Pada Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan*



Oleh:
MEISSY AMELIA AZAHRA
NIM. 15002064

**JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

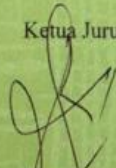
PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN BIDANG HUBUNGAN
MASYARAKAT DI SMP NEGERI KECAMATAN
PADANG UTARA

Nama : Meissy Amelia Azahra
NIM/TM : 15002064/2015
Jurusan/Prodi : Administrasi Pendidikan
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Padang, November 2019

Disetujui Oleh

Ketua Jurusan



Drs. Syahril, M.Pd., Ph.D.
NIP. 19630424 198811 1 001

Pembimbing



Dra. Anisah, M.Pd.
NIP. 19630614 198903 2 001

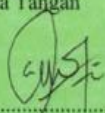
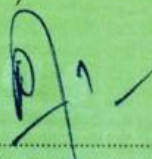

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji
Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan,
Universitas Negeri Padang

Judul : Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang
Hubungan Masyarakat di SMP Negeri
Kecamatan Padang Utara
Nama : Meissy Amelia Azahra
NIM : 15002064
Jurusan/Prodi : Administrasi Pendidikan
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Padang, November 2019

Tim Penguji,

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Dra. Anisah, M.Pd.	1..... 
2. Anggota	: Prof. Dr. Rusdinal, M.Pd.	2..... 
3. Anggota	: Dra. Elizar Ramli, M.Pd.	3..... 

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meissy Amelia Azahra
NIM/TM : 15002064/2015
Jurusan : Administrasi Pendidikan
Fakultas : Ilmu Pendidikan
Judul : Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini benar-benar karya tulis saya sendiri dan benar-benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulis skripsi ini merupakan hasil plagiat, maka saya bersedia bertanggung jawab dan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Padang, November 2019
Saya yang menyatakan



Meissy Amelia Azahra
NIM. 15002064

ABSTRAK

Meissy Amelia Azahra. 2019. Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara. Skripsi. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Padang.

Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan hasil pengamatan penulis mengenai Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara yang menunjukkan masih kurang terlaksana. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara dalam hal 1) Sekolah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah dalam pengelolaan pendidikan, 2) Warga sekolah dilibatkan dalam pengelolaan akademik, 3) Masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam pengelolaan non-akademik, 4) Keterlibatan peran serta warga sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan, 5) Setiap sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output dan pemanfaatan lulusan, 6) Kemitraan sekolah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah, 7) Kemitraan SMP atau yang setara dilakukan minimal dengan SMA atau yang setara, serta dunia usaha dan dunia industri, 8) Sistem kemitraan sekolah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis. Penelitian ini bersifat deskriptif. Populasi penelitian ini adalah wakil kepala sekolah, guru dan staff di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara yang berjumlah 159 orang. Untuk penarikan sampel dalam penelitian ini adalah *Proportional Stratified Random Sampling*, diperoleh sebanyak 52 orang. Instrumen penelitian yang digunakan berupa angket dalam bentuk Skala Likert dengan lima alternatif jawaban. Angket tersebut sudah diuji coba untuk mengetahui validitas dan reliabilitasnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Sekolah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah dalam pengelolaan pendidikan berada pada kriteria cukup baik dengan skor 3.58, 2) Warga sekolah dilibatkan dalam pengelolaan akademik berada pada kriteria baik dengan skor 3.88, 3) Masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam pengelolaan non-akademik berada pada kriteria baik dengan skor 3.92, 4) Keterlibatan peran serta warga sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan berada pada kriteria cukup baik dengan skor 3.58, 5) Setiap sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output dan pemanfaatan lulusan berada pada kriteria baik dengan skor 3.85, 6) Kemitraan sekolah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah berada pada kriteria baik dengan skor 4.05, 7) Kemitraan SMP atau yang setara dilakukan minimal dengan SMA atau yang setara, serta dunia usaha dan dunia industri berada pada kriteria baik dengan skor 3.76, dan 8) Sistem kemitraan sekolah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis berada pada kriteria baik dengan skor 3.81.

Secara keseluruhan Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara berada pada kriteria baik dengan skor 3.80.

Kata kunci : Standar Pengelolaan, Hubungan Masyarakat

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat, Karunia dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara”**. Shalawat beserta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan kepada zaman yang berilmu pengetahuan seperti pada saat sekarang ini.

Penyusunan skripsi ini bertujuan memenuhi tugas akhir yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan strata satu (S1) pada jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Selama proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Anisah, M.Pd selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang telah membimbing dengan sabar dan selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Rusdinal, M.Pd. selaku penguji I dan Ibu Dra. Elizar Ramli, M.Pd. selaku penguji II yang telah memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
3. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan yang telah membantu penulis dalam hal akademik dan administrasi.
4. Pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan yang telah membantu dalam pengurusan administrasi sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian.
5. Bapak Drs. Syahril, M.Pd.,Ph.D dan Bapak Dr. Hanif Alkadri, M.Pd selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Administrasi Pendidikan yang telah memberikan informasi terkait dengan pengurusan skripsi.

6. Kepala Sekolah SMP Negeri Kecamatan Padang Utara yang telah memberikan penulis izin untuk melakukan penelitian ditempatnya.
7. Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMP Negeri Kecamatan Padang Utara yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi angket penelitian.
8. Terkhusus kepada kedua orang tua dan keluarga besar yang telah memberikan banyak doa, dukungan, harapan, nasehat, dan semangat kepada penulis dari awal pembuatan skripsi ini sampai selesai.
9. Sahabat-sahabat dan rekan-rekan seperjuangan Jurusan Administrasi Pendidikan angkatan 2015 tanpa terkecuali, yang telah memberikan semangat, dukungan dan saran-saran demi terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang. Selanjutnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca umumnya dan bagi penulis khususnya, aamiin.

Dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal bagi kita semua.

Padang , Oktober 2019

Meissy Amelia Azahra
NIM.15002064/2015

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Pembatasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Asumsi Penelitian	9
F. Pertanyaan Penelitian	10
G. Tujuan Penelitian.....	11
H. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Kajian Pustaka	14
1. Pelaksanaan Pengelolaan	14
2. Hubungan Masyarakat.....	16
3. Indikator Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat	34
B. Penelitian Relevan	62
C. Kerangka konseptual	63
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	65
A. Jenis Penelitian	65
B. Definisi Operasional Variabel Penelitian	65

C.	Populasi dan sampel	66
1.	Populasi.....	66
2.	Sampel.....	67
D.	Jenis Data dan Sumber Data.....	71
1.	Jenis Data.....	71
2.	Sumber Data	72
E.	Instrumen dan Pengembangannya	72
F.	Pengumpulan Data.....	76
G.	Teknik Analisis Data	76
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		79
A.	Hasil Penelitian.....	79
1.	Sekolah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah dalam pengelolaan pendidikan.	79
2.	Warga sekolah dilibatkan dalam pengelolaan akademik.....	81
3.	Masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam pengelolaan non-akademik.	83
4.	Keterlibatan peran serta warga sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan	84
5.	Setiap sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output dan pemanfaatan lulusan	86
6.	Kemitraan sekolah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah	88
7.	Kemitraan SMP/MTs/SMPLB atau yang setara dilakukan minimal dengan SMA/SMK/SMALB, MA/MAK, SD/MI atau yang setara, serta dunia usaha dan dunia industri	90
8.	Sistem kemitraan sekolah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis	92
9.	Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara	94

B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	96
BAB V PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN.....	116

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Populasi Penelitian di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara	67
Tabel 2. Jumlah Sampel Penelitian di di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara	71
Tabel 3. Skala Kategori Penilaian.....	78
Tabel. 4 Deskripsi Data Dari Aspek Keterlibatan Warga Dan Masyarakat Pendukung Sekolah Dalam Pengelolaan Pendidikan	80
Tabel 5. Deskripsi dari Aspek Keterlibatan Warga Sekolah Dalam Pengelolaan Akademik.....	82
Tabel 6. Deskripsi Data dari Aspek Keterlibatan Masyarakat Pendukung Sekolah Dalam Pengelolaan Non Akademik.....	83
Tabel 7. Deskripsi Data dari Aspek Keterlibatan peran serta warga sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan.....	85
Tabel 8. Deskripsi Data dari Aspek Sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output dan pemanfaatan lulusan.....	87
Tabel 9. Kemitraan sekolah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah	89
Tabel 10. Deskripsi Data dari Aspek Kemitraan SMP/MTs/SMPLB atau yang setara dilakukan minimal dengan SMA/SMK/SMALB, MA/MAK, SD/MI atau yang setara, serta Dunia Usaha dan Dunia Industri	91
Tabel 11. Deskripsi Data dari Aspek Sistem kemitraan sekolah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis	93
Tabel 12. Rekapitulasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat Di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara	64
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kisi-kisi Instrumen Penelitian	116
Lampiran 2 : Angket Uji Coba Penelitian.....	118
Lampiran 3 : Tabel Analisis Uji Coba	127
Lampiran 4 : Analisis Hasil Uji Coba Angket Penelitian	128
Lampiran 5 : Table Nilai-nilai Rho.....	133
Lampiran 6 : Nilai-nilai R Product Moment.....	134
Lampiran 7 : Angket Penelitian	135
Lampiran 8 : Data Mentah Hasil Penelitian.....	146
Lampiran 9 : Surat Izin Penelitian Jurusan	147
Lampiran 10 : Surat Izin Penelitian Dinas Pendidikan Sumatera Barat	148
Lampiran 11 : Surat Balasan Penelitian dari SMP Negeri 7 Padang	149
Lampiran 12 : Surat Balasan Penelitian dari SMP Negeri 25 Padang	150
Lampiran 13 : Surat Balasan Penelitian dari SMP Negeri 40 Padang	151

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga pendidikan utamanya sekolah, tidak bisa terlepas dari manajemen, karena manajemen merupakan komponen integral yang tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Tanpa adanya manajemen, tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal, efektif dan efisien (Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Implementasi (2003 : 45).

Pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam memberikan bekal terhadap anak. Pemberian bekal pendidikan merupakan modal awal bagi anak untuk menjalani kehidupan dimasyarakat kelak. Pentingnya fungsi pendidikan bagi sebuah bangsa juga dipertegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Bab II Pasal 3 yang berisi :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokrat serta bertanggung jawab.

Dalam rangka pencapaian fungsi pendidikan nasional, setiap lembaga pendidikan harus memerhatikan standar-standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar

Pengelolaan Pendidikan oleh satuan dasar dan menengah, komponen-komponen dari Standar Pengelolaan Pendidikan adalah sebagai berikut ; 1) Perencanaan program, 2) Pelaksanaan program, 3) Pengawasan dan evaluasi, 4) Kepemimpinan sekolah/madrasah, 5) Sistem informasi manajemen, 6) Penilaian khusus”.

Dari beberapa komponen Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tersebut, terlihat cukup luasnya cakupan dari Standar Pengelolaan Pendidikan yang harus terpenuhi oleh sebuah lembaga pendidikan, agar dapat memenuhi kriteria minimal bagi lembaga pendidikan yang memiliki kualitas. Untuk itu perlu adanya pelaksanaan program yang merupakan pelaksanaan rencana kerja sekolah meliputi seluruh bidang pelaksanaan operasional sekolah, yaitu: bidang kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan, budaya dan lingkungan sekitar serta peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah. Seluruh bidang tersebut diselenggarakan dan dikelola oleh satuan pendidikan yang dibentuk dalam struktur organisasi sekolah. Salah satu yang perlu di perhatikan agar program-program sekolah dapat dilaksanakan dengan baik yaitu peran serta masyarakat dengan sekolah.

Pada kerangka inilah tumbuh kesadaran akan pentingnya komunikasi yang baik antara masyarakat dengan lingkungan sekitar sekolah. Humas merupakan salah satu bagian dari suatu instansi yang mempunyai tugas memahami dan mengevaluasi berbagai opini publik atau isu publik terhadap suatu instansi yang digunakan sebagai masukan terhadap berbagai kebijakan

agar tercipta keharmonisan antara suatu instansi dengan publik sebagai tujuan akhir. Humas sebagai komunikator publik harus mampu menyampaikan segala informasi kepada masyarakat dengan baik. Sejalan dengan keterbukaan informasi, perwujudan pemerintah yang baik dapat dilakukan dengan menyediakan saluran komunikasi yang efektif agar dapat mendorong keterlibatan publik. Setiap lembaga pemerintah wajib menyediakan sistem komunikasi publik yang memungkinkan masyarakat mengetahui segala yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan.

Selain itu, sekolah juga harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan. Untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara lembaga pendidikan dengan masyarakat dan pencapaian tujuan pada instansi tersebut, maka diperlukan manajemen humas, yang akan dikelola secara serius dan professional oleh setiap lembaga pendidikan, Sehingga dapat berjalan lebih efektif dan efisien serta membuahkan hasil yang maksimal.

Namun yang terjadi di lapangan berbeda dengan apa yang semestinya, banyak permasalahan-permasalahan yang muncul terkait dengan Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat di sekolah, Hal ini terlihat dari fenomena-fenomena sebagai berikut :

- 1) Kurangnya wadah masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai sekolah ataupun peserta didik, sehingga warga sekolah ataupun masyarakat kurang mendapatkan informasi ataupun kegiatan-kegiatan terbaru yang dilakukan sekolah. Hal ini penulis lihat dengan kesesuaian

perkembangan zaman yang menuntut tersedianya informasi yang cepat dan mudah diakses seperti portal khusus berbasis web, sosial media atau aplikasi perangkat seluler khusus milik sekolah yang dapat diakses oleh orang tua/ wali murid.

- 2) Kurang maksimalnya penggunaan media komunikasi humas. Hal ini terlihat pada beberapa mading sekolah yang tidak terealisasi dengan baik. Yang seharusnya bisa menjadi penyalur dan penyedia informasi bagi warga sekolah ataupun masyarakat, serta menjadi wadah kreatifitas siswa ataupun sekolah dalam mengisi mading tersebut tetapi tidak dilaksanakan dengan baik.
- 3) Masih minimnya kontribusi dan keterlibatan warga sekolah dalam pengelolaan pendidikan yang di bentuk oleh sekolah. Hal ini terlihat dari kurang jelasnya saat pelaksanaan dilapangan prosedur dan penerapan strategi pengelolaan pendidikan yang sudah dirancang sebelumnya, dikarenakan minimnya kontribusi tersebut menyebabkan sebagian warga sekolah tidak paham dengan fungsi dan tugasnya masing-masing yang berakibat pada kurangnya koordinasi antara satu bidang dengan bidang yg lainnya, sehingga membuat tujuan yang ingin dicapai tidak terlaksana secara maksimal.
- 4) Adanya guru yang tidak terlibat dalam pengelolaan kegiatan akademik sekolah. Hal ini terlihat karena masih adanya beberapa guru yang tidak hadir saat kegiatan rapat yang diadakan sekolah, beberapa guru yang

tidak bisa hadir ini disebabkan karena pelaksanaan waktu rapat yang mendadak dan terkadang saat jam mengajar sedang berlangsung.

- 5) Masih kurangnya partisipasi masyarakat pendukung sekolah dalam kegiatan non akademik. Hal ini terlihat dari masih kurang menyeluruhnya ketersediaan informasi yang diberikan pihak sekolah kepada wali murid. Membuat wali murid yang merupakan salah satu komponen penting dari masyarakat pendukung sekolah justru menjadi seakan-akan tidak ikut dilibatkan, padahal itu merupakan hak mereka dan harusnya wali murid juga perlu tau tentang berbagai kegiatan non akademik yang ada disekolah. Sehingga nantinya dengan support dan kontribusi dari wali murid diharapkan berbagai kegiatan non akademik sekolah bisa dijalankan secara optimal dan akan berdampak pada semakin banyaknya siswa yang ikut berpartisipasi nantinya
- 6) Sekolah terkesan kurang melibatkan warga sekolah dan masyarakat pendukung sekolah dalam pelaksanaan kegiatan tertentu. Padahal dari pihak sekolah itu sendiri yang jarang mengadakan kegiatan tertentu tersebut. Hal ini terlihat dari kegiatan studi banding di beberapa sekolah yang belum terealisasi dikarenakan keterbatasan biaya yang tersedia dari pemerintah daerah.
- 7) Masih kurang terjalinya kerjasama yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan lembaga-lembaga lain. Hal ini disebabkan karena keterbatasan SDM yang dimiliki dan yang ahli pada bidangnya khususnya untuk mengelola kegiatan humas, karena dari temuan di lapangan masih adanya

sekolah yang belum memiliki wakil kepala bidang humas untuk mengelola kegiatan humas yang ada disekolahnya, dan tugas humas sekolahnya dibebankan kepada guru ataupun waka yang dirasa mampu dalam hal tersebut.

- 8) Masih kurangnya jalinan kemitraan yang dilakukan pihak sekolah dengan lembaga-lembaga tertentu khususnya lembaga non pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah siswa yang dimiliki sekolah, dikarenakan belum maksimalnya kemitraan sekolah dengan masyarakat sekitar ataupun dengan SD atau yang setara membuat ketertarikan dan pamor sekolah belum begitu dikenal. Kemudian juga dipengaruhi dari para alumni yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. namun ini semua juga tidak luput dari sekolah itu sendiri yang masih dalam proses pengembangan.
- 9) Sekolah menjalin hubungan kemitraan dengan sekolah SMA atau yang setara dalam melanjutkan jenjang pendidikan bagi siswanya. Namun dikarenakan sekolah yang masih dalam proses kategori pengembangan membuat sekolah SMA atau yang setara kurang mempertimbangkan lulusan sekolah tersebut dibandingkan lulusan SMP lain yang lebih unggul.
- 10) Masih adanya kegiatan kemitraan sekolah yang tidak menggunakan aturan tertulis sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak sekolah. Ini terlihat pada kegiatan koperasi sekolah dalam penyediaan makanan bagi siswa

dengan supplier atau pedagang dalam pelaksanaannya tidak menggunakan aturan tertulis, hanya menggunakan unsur saling kepercayaan.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul penelitian mengenai, **Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Sekolah di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini penulis akan mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya wadah masyarakat dalam memperoleh informasi sekolah.
2. Kurang maksimalnya penggunaan mading atau media komunikasi sekolah.
3. Minimnya kontribusi dan keterlibatan warga sekolah dalam pelaksanaan pengelolaan pendidikan.
4. Adanya guru yang tidak terlibat dalam pengelolaan kegiatan akademik sekolah dikarenakan tidak dapat menghadiri rapat sebelumnya.
5. Masih kurangnya partisipasi masyarakat pendukung sekolah dalam kegiatan non akademik.
6. Sekolah kurang melibatkan warga sekolah dan masyarakat pendukung sekolah dalam pelaksanaan kegiatan studi banding atau kegiatan tertentu, dikarenakan keterbatasan biaya.
7. Masih kurang terjalinnya pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan lembaga-lembaga lain, disebabkan karena keterbatasan SDM yang dimiliki.

8. Masih kurangnya jalinan kemitraan yang dilakukan pihak sekolah dengan lembaga non pemerintahan. Hal ini membuat ketertarikan dan pamor sekolah belum begitu dikenal oleh masyarakat.
9. Masih kurang maksimalnya lulusan sekolah yang masih dalam tahap pengembangan di bandingkan dengan sekolah yang lebih unggul
10. Masih adanya kegiatan kemitraan sekolah yang tidak menggunakan aturan tertulis sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak sekolah.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi yang telah dikemukakan sebelumnya, banyak sekali masalah yang muncul. Masalah yang terlihat hampir semuanya mengarah kepada masalah pengelolaan bidang humas yang masih rendah dan belum sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan yang semestinya. Berdasarkan hal tersebut penulis membatasi masalah pada Sekolah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah dalam pengelolaan pendidikan, sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah, dan kemitraan disertai dengan perjanjian secara tertulis dari kedua belah pihak di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keterlibatan warga dan masyarakat pendukung sekolah dalam mengelola pendidikan di SMPN Kecamatan Padang Utara.

2. Bagaimana keterlibatan warga sekolah dalam pengelolaan akademik di SMPN Kecamatan Padang Utara.
3. Bagaimana keterlibatan masyarakat pendukung sekolah dalam mengelola non-akademik di SMPN Kecamatan Padang Utara.
4. Bagaimana keterlibatan peran serta warga dan masyarakat sekolah dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan di SMPN Kecamatan Padang Utara.
5. Bagaimana sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output dan pemanfaatan lulusan di SMPN Kecamatan Padang Utara.
6. Bagaimana sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah di SMPN Kecamatan Padang Utara.
7. Bagaimana kemitraan SMP atau yang setara dilakukan minimal dengan SMA atau yang setara, serta dunia usaha dan dunia industri di SMPN Kecamatan Padang Utara.
8. Apakah sistem kemitraan sekolah ditetapkan dengan perjanjian tertulis di SMPN Kecamatan Padang Utara dilaksanakan dengan baik.

E. Asumsi Penelitian

Penelitian ini berdasarkan pada beberapa asumsi, yaitu:

1. Setiap sekolah dituntut untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan yang sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan yang terdapat di dalam Standar Nasional Pendidikan.

2. Setiap sekolah melakukan pengelolaan humas sekolah yang sesuai dengan standar pengelolaan humas yang mencakup; keterlibatan warga dan masyarakat pendukung dalam pengelolaan pendidikan, keterlibatan warga dalam pengelolaan akademik dan keterlibatan masyarakat pendukung dalam pengelolaan non-akademik, keterlibatan peran serta warga dan masyarakat sekolah dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan, kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output dan pemanfaatan lulusan, menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah, kemitraan SMP atau yang setara dilakukan minimal dengan SMA atau yang setara, serta dunia usaha dan dunia industri, dan sistem kemitraan sekolah ditetapkan dengan perjanjian tertulis agar tercapainya pelaksanaan pengelolaan bidang humas dengan baik.

F. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diajukan beberapa pertanyaan tentang :

1. Bagaimana keterlibatan warga dan masyarakat pendukung dalam mengelola pendidikan di SMPN Kecamatan Padang Utara?
2. Bagaimana keterlibatan warga dalam mengelola akademik di SMPN Kecamatan Padang Utara?
3. Bagaimana keterlibatan masyarakat pendukung dalam mengelola non-akademik di SMPN Kecamatan Padang Utara?

4. Bagaimana pelaksanaan keterlibatan peran serta warga dan masyarakat sekolah dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan di SMPN Kecamatan Padang Utara?
5. Bagaimana pelaksanaan sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output dan pemanfaatan lulusan di SMPN Kecamatan Padang Utara?
6. Bagaimana pelaksanaan sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah di SMPN Kecamatan Padang Utara?
7. Bagaimana pelaksanaan sekolah menjalin kemitraan SMP atau yang setara dilakukan minimal dengan SMA atau yang setara, serta dunia usaha dan dunia industri di SMPN Kecamatan Padang Utara?
8. Apakah pelaksanaan sistem kemitraan sekolah ditetapkan dengan perjanjian tertulis di SMPN Kecamatan Padang Utara dilaksanakan dengan baik?

G. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ada, tujuan yang ingin dicapai dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan bidang hubungan masyarakat yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada SMPN Kecamatan Padang Utara, menyangkut hal 1) Sekolah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah dalam pengelolaan pendidikan, 2) Warga sekolah dilibatkan dalam pengelolaan akademik, 3) Masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam pengelolaan non-akademik, 4) Keterlibatan peran serta warga sekolah dan masyarakat

dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan, 5) Setiap sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output dan pemanfaatan lulusan, 6) Kemitraan sekolah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah, 7) Kemitraan SMP atau yang setara dilakukan minimal dengan SMA atau yang setara, serta dunia usaha dan dunia industri, 8) Sistem kemitraan sekolah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis,

H. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan sebelumnya, maka manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat secara praktis

a. Bagi Lembaga

Sebagai bahan untuk dijadikan pedoman dalam merumuskan dan menetapkan perencanaan kegiatan bidang hubungan masyarakat di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara sehingga mampu mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

b. Bagi Penulis

Sebagai penambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman untuk mengembangkan ilmu yang telah dipelajari secara teori.

c. Bagi Pembaca

Sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan bagi pengembangan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang administrasi pendidikan khususnya mengenai pengelolaan humas sekolah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Pelaksanaan Pengelolaan

a. Pengertian Pelaksanaan

Menurut Abdullah Syukur, Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus

dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semulas. Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsure disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

b. Pengertian Pengelolaan

Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa, Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelolah (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Menurut Terry (2009:9) mengemukakan bahwa, Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolahan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pegorganisasian, penggerakan dan pengawasan denganmemanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan

atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja.

2. Hubungan Masyarakat

a. Pengertian Hubungan Masyarakat

Pengertian hubungan masyarakat menurut Abdurrachman ialah kegiatan untuk menanamkan dan memperoleh pengertian, *good will*, kepercayaan, penghargaan dari public sesuatu badan khususnya dan masyarakat pada umumnya (Suryobroto, 2004 : 155).

Sedangkan menurut Syamsi, hubungan masyarakat adalah untuk mengembangkan opini public yang positif terhadap suatu badan, public harus diberi penerangan-penerangan yang lengkap dan obyektif mengenai kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan mereka, sehingga dengan demikian akan timbul pengertian darinya. Selain itu pendapat-pendapat dan saran-saran dari public mengenai kebijaksanaan badan itu harus diperhatikan dan dihargai (suryosurbroto, 2004 : 155).

Pendapat dari Glenn & Denny Griswold yang dikutip Suryosubroto (2001:12) menyatakan bahwa, *Public relations is the management function which evaluates public attitudes, identified the policies, and prosedur of individual or organization with the public interest, and executes a program of action to earn public understanding and acceptance*. Pengertian tersebut mengandung makna bahwa humas

merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap publik, menyesuaikan kebijaksanaan dan prosedur instansi atau organisasi dengan kepentingan umum, serta program untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik bahwa Hubungan masyarakat merupakan jalinan interaksi yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan aspirasi, simpati dari masyarakat. Dan mengupayakan terjadinya kerjasama yang baik antar sekolah dengan masyarakat untuk kebaikan bersama, atau secara khusus bagi sekolah penjalinan hubungan tersebut adalah untuk mensukseskan program-program sekolah yang bersangkutan sehingga sekolah tersebut bisa tetap eksis.

Berdasarkan defenisi diatas pengertian humas secara umum adalah fungsi yang khas antara organisasi dengan publiknya, atau dengan kata lain antara lembaga pendidikan dengan warga di dalam (guru, karyawan, siswa) dan warga dari luar (wali siswa, masyarakat, institusi luar, partner sekolah) dalam konteks ini jelas bahwa humas atau publick relation termasuk salah satu elemen yang penting dalam suatu organisasi kelompok ataupun secara individu.

Maka, Pengertian Pengelolaan Humas adalah suatu proses dalam menangani perencanaan, pengorganisasian, mengkomunikasikan serta mengkoordinasikan yang secara serius dan rasional dalam upaya pencapaian tujuan bersama dari organisasi atau lembaga yang

diwakilinya. Dan untuk merealisasikan itu semua banyak hal yang harus dilakukan oleh Humas dalam suatu lembaga pendidikan (Nasution, 2006).

b. Tujuan dan manfaat Hubungan Masyarakat

Tujuan humas pada dasarnya untuk membangun hubungan yang baik antara sekolah dengan masyarakat dengan menyelaraskan kepentingan sekolah dan kepentingan masyarakat. Menurut L.Hagman (Depdiknas, 2007: 40) menyebutkan bahwa tujuan humas adalah:

- 1) Untuk memperoleh bantuan dari orang tua murid/masyarakat. Bantuan yang dimaksud bukan sekedar uang tetapi dapat berbentuk semua dukungan atau sumbangan yang bertujuan membantu dalam pengembangan sekolah.
- 2) Untuk memajukan program pendidikan. Humas yang berfungsi sebagai jembatan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat sehingga keduanya dapat bersama-sama saling bahu-membahu dalam upaya memajukan kualitas pendidikan.
- 3) Untuk mengembangkan kebersamaan dan kerjasama yang erat, sehingga segala permasalahan dan lain-lain dapat dilakukan secara bersama dan dalam waktu yang tepat.

Sementara Elsbree dan Mc Nelly (Ngalim Purwanto, 2009: 190) memberikan pendapatnya mengenai tiga tujuan pokok dari husemas yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan mutu belajar dan pertumbuhan.

- 2) Meningkatkan tujuan mutu kehidupan masyarakat.
- 3) Mengembangkan pengertian, antusiasme dan partisipasi masyarakat.

Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat lebih menekankan pada pengembangan kemampuan belajar anak dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang kemudian dapat mendapatkan pengertian, antusias serta dukungan dari masyarakat untuk pendidikan. Uraian ini dapat dianalisis bahwa kegiatan humas tidak hanya tentang bantuan keuangan dari masyarakat tetapi lebih jauh tentang hal-hal yang bertujuan peningkatan kualitas pendidikan.

Maka dari kedua pendapat tersebut dapat diuraikan bahwa tujuan hubungan masyarakat adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dan kualitas hasil belajar siswa dengan mengharapkan pengertian, antusias dan semua bentuk dukungan dari masyarakat/orang tua baik dari segi materi ataupun sumbangan pemikiran.

Manfaat dari hubungan masyarakat adalah menambah simpati masyarakat yang dapat meningkatkan harga diri (prestise) sekolah, serta dukungan masyarakat terhadap sekolah secara spiritual dan material atau financial.

c. Faktor yang mempengaruhi Hubungan Masyarakat

- 1) Faktor perubahan sikap, tujuan dan metode mengajar di sekolah.
- 2) Faktor masyarakat yang menurut adanya perubahan-perubahan dalam pendidikan di sekolah dan masyarakat.

3) Faktor ide demokrasi bagi masyarakat terhadap pendidikan.

d. Prinsip-prinsip dalam Hubungan Masyarakat

Dalam melaksanakan relasi dengan masyarakat tentunya sekolah harus memperhatikan hal-hal yang dapat mendorong tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Adapun prinsip-prinsip dalam hubungan masyarakat yang diungkapkan dalam Depdiknas (2007: 42-47) antara lain sebagai berikut:

1) *Integrity*

Prinsip ini dapat diartikan bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu yang berarti bahwa semua informasi yang diberikan kepada masyarakat harus terpadu antara informasi yang berkaitan dengan kegiatan akademik maupun non akademik. Dalam hal ini tentunya sekolah harus selalu *transparan* dengan masyarakat terkait semua kegiatan persekolahan agar tidak terjadi salah persepsi dari masyarakat.

2) *Continuity*

Prinsip ini mengandung makna bahwa kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terus berlanjut dan berkesinambungan. Perkembangan informasi tentang kemajuan belajar maupun permasalahan sekolah seharusnya selalu *update* memberikan penjelasan ke masyarakat/orang tua sehingga mereka mengerti tentang keterlibatan mereka dalam meningkatkan mutu pendidikan putra-putrinya.

3) *Coverage*

Pemberian informasi yang diberikan kepada masyarakat hendaknya mencakup semua aspek artinya prinsip ini menekankan bahwa segala informasi harus lengkap, akurat dan *up to date*. Lengkap diartikan tidak ada satupun informasi yang ditutupi atau disembunyikan. Akurat berarti informasi yang diberikan memang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, benar sesuai fakta dan tidak dibuat-buat. Sedangkan *up to date* yang mengandung makna bahwa informasi yang diberikan tentang perkembangan, kemajuan, masalah dan prestasi sekolah terakhir.

4) *Simplicity*

Prinsip kesederhanaan mengandung arti bahwa informasi yang disajikan kepada masyarakat melalui pertemuan langsung maupun tidak langsung hendaknya disajikan dalam bentuk sederhana sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat setempat. Informasi yang sederhana tersebut misalnya informasi yang dinyatakan dengan kata-kata yang penuh persahabatan atau keakraban, mudah dimengerti, kata-kata yang jelas serta menggunakan pendekatan setempat.

5) *Constructiveness*

Informasi yang diberikan kepada masyarakat hendaknya bersifat konstruktif yang bermakna membangun, dalam artian membangun kepercayaan, pengertian maupun respon positif dari masyarakat tentang sekolah. Maka hal tersebut akan memudahkan terjadinya

hubungan kerjasama yang baik antara sekolah dengan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

6) *Adaptibility*

Prinsip ini mengandung arti bahwa program husemas hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat tersebut seperti penyesuaian aktivitas, kebiasaan, budaya, dan bahan informasi yang berlaku di dalam masyarakat.

Dari berbagai prinsip humas yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan humas merupakan kegiatan yang terpadu dan kompleks sehingga harus memperhatikan prinsip-prinsip humas untuk mengurangi berbagai kesalahan dalam menyusun program kerja humas karena menyangkut dengan tujuan sekolah dan hubungan dengan lingkungan masyarakat sekitar.

e. Pentingnya Hubungan Masyarakat

- 1) Sekolah adalah bagian lembaga integral dari masyarakat ia bukan merupakan lembaga yang terpisah dari masyarakat.
- 2) Hak hidup dan kelangsungan hidup sekolah bergantung pada masyarakat.
- 3) Sekolah adalah lembaga social yang berfungsi untuk melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan.
- 4) Kemajuan sekolah dan kemajuan masyarakat saling berkorelasi, keduanya saling membutuhkan.

5) Masyarakat adalah pemilik sekolah, sekolah ada karena masyarakat memerlukan.

f. Program Hubungan Masyarakat

Dalam pengertian umum “program” diartikan sebagai rencana atau rancangan yang dilakukan ke depan. Sedangkan program menurut Suharsimi Arikunto & Cipi Safruddin (2010: 4) didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi suatu implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Purwanto (2011: 24) juga mengungkapkan bahwa program adalah perencanaan kegiatan yang akan dilakukan untuk tujuan tertentu dan dapat diukur keberhasilannya. Dari kedua pendapat dapat disimpulkan bahwa program merupakan serangkaian kegiatan sebagai bentuk implementasi kebijakan yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Jika digabungkan dengan definisi husemas maka program husemas merupakan serangkaian kegiatan yang akan dilakukan husemas sebagai bentuk dari implementasi kebijakan yang telah dirancang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Terdapat beberapa jenis program yang ditinjau dari beberapa aspek, menurut Haryanto (2000: 28-29) macam-macam program ditinjau dari tujuan, jenis, jangka waktu, luas, sempitnya, pelaksana dan sifatnya antara lain dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Ditinjau dari tujuan, ada program yang bertujuan mencari keuntungan, dan ada juga yang bertujuan sukarela. Dengan demikian ukuran keberhasilan tujuan mencari keuntungan adalah seberapa besar keuntungan yang didapat sedangkan program yang bertujuan sukarela ukuran keberhasilannya adalah seberapa banyak program tersebut bermanfaat bagi orang lain.
- 2) Ditinjau dari jenis, merupakan program yang ditinjau dari isi kegiatan dalam program tersebut yang cenderung kurang memberikan variasi atas penilaiannya. Contoh program koperasi, program pertanian dan lain-lain.
- 3) Ditinjau dari jangka waktu, yang terdiri dari program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Program jangka pendek merupakan program yang berlangsung selama satu tahun atau kurang, program jangka menengah merupakan program yang berlangsung selama satu sampai lima tahun, sedangkan program jangka panjang merupakan program yang berlangsung selama lebih dari lima tahun.
- 4) Ditinjau dari keluasannya, ada program sempit dan program luas. Program sempit merupakan program yang hanya menyangkut variable terbatas sedangkan program luas menyangkut banyak variabel.
- 5) Ditinjau dari pelaksanaan, yaitu program yang melibatkan seberapa banyak orang. Program kecil hanya dilaksanakan beberapa orang

sedangkan program besar dilaksanakan berpuluh bahkan berates orang.

- 6) Ditinjau dari sifatnya, merupakan program yang dilihat dari tingkat kepentingan. Program penting adalah program yang dampaknya menyangkut nasib orang banyak mengenai hal yang vital sedangkan program tidak penting merupakan sebaliknya.

Manajemen program humas dapat dijabarkan dalam penjelasan sebagai berikut:

- 1) Identifikasi Kebutuhan

Tahap ini merupakan tahap awal sebagai langkah dalam pengenalan lingkungan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat.

- 2) Analisis Kebutuhan

Setelah diidentifikasi kebutuhan melakukan analisis kebutuhan yang harus segera dipenuhi atau dilihat dari tingkat kepentingannya dengan mengedepankan hal segera dilakukan perencanaan.

- 3) Perencanaan Kegiatan

Perencanaan kegiatan berupa matrik perencanaan yang berisi tentang sumber daya (waktu dan biaya), prioritas, alternative-alternatif kegiatan serta berbagai macam media yang digunakan, dan pembentukan tim serta pembagian tugas tugas. Selain itu dalam perencanaan memuat bagaimana strategi atau langkahlangkah yang akan digunakan untuk sebagai kiat khusus dalam membantu ketercapaian program.

4) Pelaksanaan Kegiatan (Implementasi)

Pelaksanaan program husemas adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan husemas yang telah dilaksanakan baik melalui media atau tidak. Keberhasilan pelaksanaan suatu program akan tergantung dari cara atau kiat khusus, dan pengalaman yang dilakukan pengelola. Pelaksanaan program haruslah dilakukan dengan kecermatan dan kejelian agar tidak menyimpang dari apa yang telah direncanakan. Tidak dipungkiri bahwa kepala sekolah merupakan aktor utama dalam keberhasilan pelaksanaan program humas karena menyangkut bagaimana kepemimpinan dan akses relasinya dengan berbagai lembaga pemerintah maupun swasta. Ketercapaian program humas akan terlihat apabila pesan dapat diterima baik oleh masyarakat.

5) Monitoring kegiatan (Monitoring)

Monitoring merupakan kegiatan pemantauan selama program berlangsung untuk melihat dan mengkaji *progress* keberhasilan program. Kegiatan pemantauan juga untuk mengetahui kendala-kendala yang ada selama pelaksanaan program agar dapat dilakukan perbaikan secara langsung dan sebagai bahan evaluasi pada akhir program.

6) Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan adalah menilai sejauh mana program yang telah dilaksanakan apakah telah sesuai dengan tujuan awal. Kejelasan konsep akan sangat membantu dalam menerapkan ukuran terhadap

konsep yang diukur. Ukuran atau standar konsep menjadi factor penting sebagai panduan dalam melakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana program dapat dikatakan efektif dan efisien. Terdapat dua macam evaluasi pada akhir program yaitu diantaranya:

a) Evaluasi dampak

Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak yang dirasakan atau perubahan di masyarakat setelah dilaksanakan program.

b) Evaluasi akhir program

Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji tujuan program apa saja yang telah tercapai dan belum tercapai. Kemudian mengkajinya ke dalam langkah perbaikan melalui partisipasi, baik berupa keterlibatan masyarakat, besarnya biaya, jumlah siswa dan lain-lain.

Dari pemaparan diatas maka dapat diketahui bahwa tahapan program kegiatan humas meliputi identifikasi kebutuhan, analisis kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, pengecekan tanggapan masyarakat, penilaian/evaluasi dan pengontrolan hasil dan pemberian saran kepada atasan. Pada penelitian ini, peneliti menggabungkan kedua teori tersebut dengan menyederhanakannya ke dalam beberapa fokus utama yaitu tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta tindak lanjut. Hal ini dikarenakan pada identifikasi dan analisis kebutuhan serta

persiapan merupakan bagian dari perencanaan, dan pengecekan ataupun pengontrolan hasil juga bagian dari evaluasi program.

g. Jenis-jenis Kegiatan Hubungan Masyarakat

Kegiatan humas merupakan *action* program sebagai bentuk implementasi dari kebijakan yang telah dirancang. Suryosubroto (2001:29) menyebutkan bahwa kegiatan husemas terbagi ke dalam dua golongan yaitu husemas ke dalam (*internal public relations*) dan husemas ke luar (*externalpublic relations*).

1) Kegiatan Internal

Kegiatan internal merupakan kegiatan yang sasarannya ditujukan kepada warga sekolah yang bersangkutan seperti staff, guru dan seluruh siswa. Tujuan dari kegiatan internal antara lain :

- a) Memberi penjelasan tentang kebijaksanaan penyelenggaraan sekolah, situasi dan perkembangannya.
- b) Menampung saran dan pendapat dari warga sekolah yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan sekolah.
- c) Dapat memelihara hubungan yang harmonis dan terciptanya kerjasama antara warga sekolah.

Kegiatan internal terbagi ke dalam dua kegiatan yaitu kegiatan langsung (tatap muka) dan tidak langsung (melalui media tertentu). Kegiatan internal langsung antara lain: rapat dewan guru, upacara sekolah, karyawisata/rekreasi, penjelasan pada berbagai kesempatan yang ada misalnya pada pertemuan arisan, syawalan dan sebagainya.

Sementara kegiatan internal tidak langsung antara lain seperti, penyampaian informasi melalui surat edaran, penggunaan papan pengumuman di sekolah, penyelenggaraan majalah dinding, menerbitkan bulletin sekolah yang dibagikan kepada warga sekolah, pemasangan iklan/ pemberitahuan khusus melalui mass media pada kesempatan-kesempatan tertentu, dan kegiatan seperti pentas seni, acara tutup tahun dan sebagainya.

2) Kegiatan Eksternal

Kegiatan eksternal merupakan kegiatan yang ditujukan kepada masyarakat baik secara langsung (tatap muka) ataupun tidak langsung (melalui perantara media). Contoh kegiatan eksternal secara langsung atau tatap muka seperti rapat pengurus BP3 (Dewan Sekolah), konsultasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, melayani kunjungan tamu, dan sebagainya. Sedangkan kegiatan eksternal secara tidak langsung antara lain yaitu:

a) Penyebaran informasi melalui TV

Berhasil tidaknya penyebaran informasi melalui TV dipengaruhi oleh bagaimana penyajian dalam program yang ditayangkan. Hal ini dikarenakan TV yang merupakan audio visual yang mempertontonkan gambar dan suara sehingga penyajian harus disusun dan dipersiapkan sedemikian rupa sehingga mengundang opini atau ketertarikan masyarakat. Beberapa

keuntungan yang diperoleh dari penyebaran informasi lewat TV antara lain :

- (1) Program kegiatan yang menarik akan sangat potensial untuk menimbulkan minat publik mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan sekolah.
- (2) Mengenalkan program kegiatan sekolah kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dan mau memberikan dukungan moril maupun materiil. Beberapa cara yang dapat dilaksanakan sekolah dalam penyebaran informasi lewat TV antara lain; ceramah biasa, wawancara, ceramah dengan alat-alat peraga, diskusi, sandiwara, acara cerdas tangkas, dan kegiatan kesenian dan sebagainya.

b) Penyebaran informasi melalui radio

Radio merupakan media massa yang dapat menjangkau public yang luas oleh sebabnya sekolah seharusnya dapat memanfaatkannya seoptimal mungkin untuk kepentingan publisitas. Beberapa keuntungan dari penyebaran informasi lewat radio antara lain:

- (1) Teks yang diperlukan dapat disiapkan sebaik-baiknya sebelum dipublikasikan.
- (2) Tidak dipengaruhi oleh faktor komunikator, seperti sikap dan penampilan.
- (3) Dapat dibantu dengan latar belakang musik.
- (4) Jangkauan luas serta dapat melalui batas dan waktu

c) Penyebaran informasi melalui media cetak atau *pers*

Media cetak yang dimaksud adalah seperti surat kabar, majalah, buletin dan sebagainya. Keuntungan penyebaran informasi melalui pers antara lain :

- (1) Dapat dijangkau publik yang sangat luas.
- (2) Dapat dipelajari publik yang bersangkutan secara mendadak.
- (3) Dapat mengharapkan respon dari publik.

d) Pameran Sekolah

Pameran sekolah adalah memperkenalkan hasil pekerjaan atau ketrampilan yang menunjukkan kreativitas para siswa kepada masyarakat umum. Adapun persiapan yang perlu dilakukan dalam mengadakan pameran sekolah antara lain :

- (1) Pembuatan brosur-brosur.
- (2) Pembuatan poster-poster, gambar-gambar.
- (3) Pembelian barang/ bahan-bahan yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan.
- (4) Menyeleksi, mengatur dan memelihara bahan-bahan pameran.
- (5) Mengadakan latihan-latihan yang cukup bag murid-murid, petugas dan penjaga pameran.

e) Berusaha sendiri penerbitan majalah atau buletin sekolah

Berusaha sendiri penerbitan majalah adalah sekolah berusaha membuat dan menerbitkan sendiri majalah atau buletin yang

ditujukan untuk masyarakat luas di luar sekolah. Hal tersebut lebih efektif karena tidak dibatasi kolom halaman sehingga sekolah lebih leluasa mengisi berita-berita dan artikel-artikel sekolah yang bersangkutan.

Secara khusus jika ditelaah kegiatan humas yang bersifat ke luar (eksternal) digunakan sebagai alat untuk memperlihatkan kesan yang baik atau mempromosikan dan melindungi citra organisasi di mata masyarakat.

Hal ini berkaitan dengan hakekat husemas sebagai bagian organisasi yang selalu berhubungan dengan media massa. Agus Hermawan (2012:150) menambahkan bahwasannya kegiatan-kegiatan husemas meliputi hal-hal berikut:

1) Hubungan pers

Yaitu memberikan informasi yang layak untuk dimuat di surat kabar atau media massa lainnya agar dapat menarik perhatian publik terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh lembaga.

2) Publisitas produk

Yaitu berbagai aktivitas yang menyangkut upaya untuk mempublikasikan produk atau jasa dari perusahaan atau lembaga. Kegiatan publisitas seperti pembuatan spanduk, brosur dan lain sebagainya.

3) Komunikasi korporat

Yaitu merupakan kegiatan yang mencakup komunikasi internal dan eksternal serta mempromosikan pemahaman tentang organisasi.

4) Melobi

Melobi merupakan usaha untuk bekerjasama dengan pejabat di atasnya sehingga organisasi mendapatkan informasi-informasi yang berharga. Bahkan sering kali dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil.

5) Konseling

Konseling merupakan aktivitas yang dilakukan dengan jalan memberi saran dan pendapat kepada manajemen mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan publik serta mengenai posisi dan citra perusahaan. Tugas humas adalah menganalisis keadaan kondisi dan situasi yang terjadi dalam intern dan ekstern lembaga oleh sebab itulah humas mengetahui secara jelas masalah-masalah yang sedang berkembang yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur atau pertimbangan dalam perencanaan suatu program.

Dari berbagai pemaparan di atas maka dapat dikatakan bahwa kegiatan hubungan masyarakat dimaksudkan untuk memperkenalkan apa saja yang harus diketahui oleh publik tentang sekolah yang bersangkutan. Informasi yang diperoleh masyarakat tentang sekolah akan berpengaruh pada seberapa besar simpati dan dukungannya terhadap sekolah. Besarnya simpati dan dukungan masyarakat tentu saja akan berdampak pada manajemen sekolah dalam menjalankan roda sekolah.

3. Indikator Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007, Standar Pengelolaan Bidang Humas sebagai berikut :

- 1) Sekolah atau madrasah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah/madrasah dalam pengelolaan pendidikan.
- 2) Warga sekolah/madrasah dilibatkan dalam pengelolaan akademik.
- 3) Masyarakat pendukung sekolah/madrasah dilibatkan dalam pengelolaan non-akademik.
- 4) Keterlibatan peran serta warga sekolah/madrasah dan masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan.
- 5) Setiap sekolah/madrasah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output, dan pemanfaatan lulusan.
- 6) Kemitraan sekolah/madrasah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah.
- 7) Kemitraan SD/MI/SDLB atau yang setara dilakukan minimal dengan SMP/MTs/SMPLB atau yang setara, serta dengan TK/RA/BA atau yang setara di lingkungannya.
- 8) Kemitraan SMP/MTs/SMPLB atau yang setara dilakukan minimal dengan SMA/SMK/SMALB, MA/MAK, SD/MI atau yang setara, serta dunia usaha dan dunia industri.

- 9) Kemitraan SMA/SMK, MA/MAK atau yang setara dilakukan minimal dengan perguruan tinggi, SMP/MTs atau yang setara, serta dunia usaha dan dunia industry di lingkungannya.
- 10) Sistem kemitraan sekolah/madrasah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis.

Berdasarkan objek penelitian, maka indikator yang relevan dengan objek penelitian ini adalah :

- 1) Sekolah atau madrasah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah/madrasah dalam pengelolaan pendidikan.

Menurut Isbandi (2007:27) Keterlibatan atau partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Yusufhadi Miarso (2004:706) menggunakan istilah partisipasi untuk mengatakan peran serta. Partisipasi menurutnya merupakan hal turut serta dalam suatu kegiatan. Pengertian masyarakat menurutnya adalah kumpulan individu yang menjalin kehidupan bersama sebagai suatu kesatuan yang besar, yang saling membutuhkan, memiliki ciri-ciri yang sama sebagai kelompok.

Resbin L. Sihite (2007:16) mengemukakan bahwa peran serta adalah berbagai aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam suatu program atau kegiatan tertentu, sehingga bermakna dalam pencapaian tujuan. Menurutnya wujud dari peran serta yang diberikan dapat berupa pemikiran, tindakan, sumbangan dana atau barang yang berguna bagi program ataupun pencapaian tujuan. Ia juga mengemukakan pengertian masyarakat sebagai sekelompok orang yang hidup dalam daerah khusus.

Istilah masyarakat dalam UU No.20 Tahun 2003 diartikan sebagai kelompok warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan adalah aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bidang pendidikan dengan tujuan untuk memajukan pendidikan dengan cara-cara tertentu. Kelompok orang yang dimaksud adalah dapat berupa masyarakat yang berhubungan langsung dengan pendidikan seperti orang tua siswa yang tergabung dalam komite sekolah, masyarakat luas yang tergabung dalam dewan pendidikan, dunia usaha seperti badan-badan usaha yang dapat berpartisipasi dalam program Manajemen Berbasis Sekolah, penyelenggara pendidikan nonpemerintah, dan sebagainya.

Sedangkan menurut (Hendayat Soetopo dan Wasty Soemanto) definisi pengelolaan pendidikan adalah segala bentuk kegiatan

pengaturan dan penataan yang berkaitan dengan peserta didik yang dimulai dari masuk sampai keluarnya peserta didik dari suatu lembaga pendidikan.

Pengelolaan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya didalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Minimal tiga dimensi penting didalam konsep pengelolaan : 1) Dimensi *pertama*, dalam pengelolaan terjadi kegiatan yang dilakukan oleh seseorang pengelola (Pemimpin, kepala, komandan dsb). Dimensi ini menunjukkan betapa pentingnya kemampuan dan keterampilan khusus yang perlu dimiliki oleh pengelola untuk melakukan hubungan kemanusiaan dan untuk mempengaruhi orang lain baik melalui hubungan perorangan maupun melalui hubungan kelompok, 2) Dimensi *kedua*, menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan bersama dan melalui orang lain itu mempunyai tujuan yang hendak dicapai, dan 3) dimensi *ketiga*, pengelolaan itu dilakukan dalam organisasi, sehingga tujuan organisasi dicapai melalui kegiatan yang dilakukan bersama orang lain baik perorangan maupun kelompok.

Yang termasuk warga dan masyarakat pendukung di sekolah, yaitu :

a) Komite

- b) Wali Murid
- c) Warga dan Masyarakat di sekitar sekolah

Resbin L. Sihite (2007:15) mengemukakan tujuh peran serta masyarakat dalam pendidikan yaitu:

- a) Sebagai sumber pendidikan
- b) Sebagai pelaku pendidikan
- c) Pelaksana pendidikan
- d) Pengguna hasil pendidikan
- e) Perencanaan pendidikan
- f) Pengawasan pendidikan
- g) Evaluasi program pendidikan.

- 2) Warga sekolah/madrasah dilibatkan dalam pengelolaan akademik.

Ratnawati (2015) Warga sekolah merupakan anggota sekolah berupa komponen hidup yang terdiri dari masukan sumber daya manusia, masukan lingkungan dan masukan mentah. Dengan kata lain warga sekolah merupakan kepala sekolah, guru, tenaga tata usaha, pesuruh atau tukang kebun, komite sekolah serta siswa.

Mubtadin (2016) kegiatan akademik adalah proses interaksi, komunikasi antara guru dan siswa dalam situasi dan kondisi yang sudah direncanakan sesuai kurikulum yang telah ditetapkan oleh sekolah. Kegiatan akademik, umumnya dilakukan di dalam kelas yakni pembelajaran yang terkait dengan mata pelajaran tertentu

seperti belajar kimia, fisika, matematika, geografi, seni budaya dan lain sebagainya.

Kegiatan akademik lebih menonjolkan kemampuan taraf berfikir siswa (*kognitif learning*). Biasanya pembelajaran dilakukan dengan system ceramah, demonstrasi, diskusi kelompok, bermain peran yang diakhiri dengan adanya tes tertulis maupun lisan.

Keberhasilan dalam kegiatan akademik diukur dengan kemampuan siswa dalam mendapatkan nilai yang diberikan oleh gurunya. Bagi siswa yang memperoleh nilai tinggi berarti ia telah berhasil dalam mengikuti kegiatan akademik, sebaliknya jika siswa emperoleh nilai rendah, itu artinya menggambarkan siswa belum kelar mengikuti pembelajarannya. Semakin jarang membaca, maka kemungkinan besar siswa sulit memecahkan masalah atau meyelesaikan tugas yang diberikan guru padanya.

- 3) Masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam pengelolaan non-akademik.

Mubtadiin (2016) Pembelajaran non akademik merupakan kegiatan yang dilakukan di luar kurikulum seperti ekstrakurikuler, kegiatan pramuka, karya ilmiah remaja, palang merah remaja, olah raga futsal dan lain-lain. Pembelajaran tersebut diadakan semata-mata untuk mewujudkan peserta didik yang mampu mengembangkan potensi dirinya baik potensi keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang

diperlukan dirinya dan masyarakat. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mendefinisikan pendidikan sebagai suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu sekolah perlu memberikan kebebasan pada siswa dan siswi untuk mendapatkan prestasi baik di bidang mata pelajaran (akademik) maupun bidang di luar mata pelajaran (non akademik). Seperti dengan menyalurkan berbagai bakat melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah.

Lestari (2017) Kegiatan non akademik di sekolah yang biasa disebut dengan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan-kegiatan ini ada pada setiap jenjang pendidikan dari sekolah dasar sampai universitas. Kegiatan ekstrakurikuler ditujukan agar siswa dapat mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuannya di berbagai bidang di luar bidang akademik. Kegiatan ini diadakan secara swadaya dari pihak sekolah maupun siswa-siswi itu sendiri untuk merintis kegiatan di luar jam pelajaran sekolah.

Mengenal keberbakatan anak bermanfaat bagi orangtua agar mereka dapat memahami dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak.

Dengan mengenal ciri-ciri anak berbakat, orangtua dapat pula menyediakan lingkungan pendidikan yang sesuai dengan bidang kebbakatan anak. Mereka dapat membantu anak memahami dirinya agar tidak melihat kebbakatannya sebagai sebuah beban melainkan sebuah anugerah yang harus dihargai dan dikembangkan.

Mulyono (2008: 189) memaparkan bahwa sasaran kegiatan ekstrakurikuler ini adalah seluruh peserta didik di sekolah, madrasah maupun lembaga-lembaga pendidikan non formal lainnya seperti pesantren. Pengelolaannya diutamakan ditangani oleh peserta didik itu sendiri, dengan tidak menutup kemungkinan bagi keterlibatan guru atau pihak-pihak lain jika diperlukan sebagai pembimbing.

Bentuk-bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan tingkat pemahaman dan kemampuan peserta didik serta tuntutan-tuntutan lokal dimana sekolah maupun madrasah berada. Sehingga melalui kegiatan yang diikutinya, peserta didik mampu belajar untuk memecahkan masalah-masalah yang berkembang dilingkungannya dengan tetap tidak melupakan masalah-masalah global tertentu saja yang juga harus pula diketahui oleh peserta didik. Selain itu dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler akan mampu membentuk kedisiplinan dan karakter bagi peserta didik.

Dengan mengikuti kegiatan tersebut, anak akan dapat belajar serta menemukan potensi yang ada di dalam dirinya. Serta dapat pula

sebagai sarana bermain yang positif dengan teman-teman yang satu kegiatan dengannya. Hal ini tentu saja merupakan hal yang positif untuknya, selain menambah ilmu, anak tersebut secara tidak langsung akan belajar cara sosialisasi dengan orang baru agar anak tersebut tidak canggung dan gugup nantinya.

Nikodemus (2015) mengungkapkan bahwa Kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk :

- a) Mengembangkan bakat dan minat siswa dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya yang positif.
- b) Menyalurkan kemampuan yang dimiliki siswa dan memanfaatkannya sebaik mungkin dalam bidang pencapaian prestasi.
- c) Sebagai sarana untuk mengisi waktu luang siswa agar tidak terbuang sia-sia dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang sudah disediakan di sekolah. Kegiatan dari ekstrakurikuler ini sendiri dapat berbentuk kegiatan pada seni, olahraga, pengembangan kepribadian, dan kegiatan lain yang bertujuan positif untuk kemajuan dari siswa-siswi itu sendiri.

Yang termasuk warga dan masyarakat pendukung di sekolah, yaitu :

- a) Komite
- b) Wali Murid
- d) Warga dan Masyarakat di sekitar sekolah

Menurut Siti Irene (2015) jenis partisipasi atau kegiatan yang melibatkan masyarakat pendukung sekolah dalam pengelolaan non akademik, yaitu :

- a) Partisipasi dalam komite sekolah untuk meningkatkan prestasi non akademik

Rapat yang diselenggarakan oleh sekolah adalah rapat mengenai program sekolah serta mengenai pembiayaan seperti dana, bantuan sekolah, SPP, dan beasiswa. Bentuk partisipasi orang tua dalam komite sekolah dapat dibagi menjadi dua yaitu partisipasi dalam bentuk fisik yaitu kehadiran mereka dalam berbagai undangan yang diberikan oleh pihak sekolah, seperti Selain itu terdapat partisipasi dalam bentuk non fisik yaitu ditunjukkan dengan adanya berbagai pikiran, ide atau gagasan, kritikan serta masukan yang disampaikan oleh orangtua ketika menghadiri Rapat Komite.

- b) Partisipasi dalam pembiayaan sekolah untuk meningkatkan prestasi non akademik

Partisipasi masyarakat juga ditunjukkan dengan hal pembiayaan sekolah. Orang tua juga memberikan fasilitas guna mendukung kegiatan sekolah, seperti, membelikan buku, biaya lain dikeluarkan seperti membayar sejumlah kegiatan yang diadakan oleh pihak sekolah seperti studi wisata, kegiatan perayaan HUT sekolah, dll. Selain itu bagi orang tua anak yang

berprestasi dalam bidang non akademik juga berusaha memberikan sarana dan prasarana guna mendukung kegiatan dan peningkatan prestasi tersebut dengan membelikan kebutuhan yang sekiranya dibutuhkan oleh anak seperti sepatu, bola voli. Orang tua juga memfasilitasi anak dengan memasukkan anak ke dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan diluar sekolah sebagai upaya penyaluran bakat seperti sanggar tari, grup pelatihan bola voli.

- c) Partisipasi dalam mengatasi masalah anak untuk meningkatkan prestasi non akademik

Masyarakat atau orang tua memberikan fasilitas guna menunjang kegiatan anak, selain itu sering memberikan dukungan anak melalui keikutsertaan mereka mendampingi anak ketika melakukan kompetisi yang dilakukan diluar sekolah. Mereka juga sering memberikan motivasi dan nasehat agar anak tidak mudah putus asa. Mereka memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak agar anak merasa mereka mendapatkan dukungan atas kegiatan yang dilakukan. Selain berbrntuk fisik, partisipasi orang tua juga ditunjukkan dalam bentuk non fisik yaitu adanya nasehat-nasehat yang diberikan kepada anak serta motivasi sebagai dukungan atas kegiatan anak dan apresiasi mereka atas prestasi yang dicapai anak.

- 4) Keterlibatan peran serta warga dan masyarakat sekolah dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan.

Kegiatan tertentu yang ditetapkan sekolah yakni studi banding. Studi Banding (comparison study) adalah sebuah konsep belajar yang dilakukan di lokasi dan lingkungan berbeda yang merupakan kegiatan yang lazim dilakukan untuk maksud peningkatan mutu, perluasan usaha, perbaikan sistem, penentuan kebijakan baru, perbaikan peraturan perundangan, dan lain-lain.

Kegiatan studi banding dilakukan oleh kelompok kepentingan untuk mengunjungi atau menemui obyek tertentu yang sudah disiapkan dan berlangsung dalam waktu relatif singkat. Intinya adalah untuk membandingkan kondisi obyek studi di tempat lain dengan kondisi yang ada di tempat sendiri. Adapun tujuan studi banding itu adalah :

- a) untuk menambah wawasan kita tentang tempat lain
 - b) untuk menimba pengalaman baru di ditempat lain
 - c) untuk membandingkan tempat kita dengan tempat lain
 - d) untuk menambah cakrawala berfikir kita
- 5) Sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output dan pemanfaatan lulusan.

Kemitraan itu diartikan sebagai suatu hubungan untuk menjalin kerjasama. Secara etimologi menurut Widodo (2002:441), kata kemitraan berasal dari kata mitra yang artinya pasangannya, atau part

ner usaha. Mitra, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya teman, sahabat, kawan kerja. Visualsynonim, kamus online memberikan definisi yang sangat bagus mengenai kemitraan. Kemitraan diartikan sebagai hubungan kooperatif antara orang atau kelompok orang yang sepakat untuk berbagi tanggungjawab untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan.

Dengan demikian kata lain kemitraan diartikan sebagai suatu hubungan kerja sama. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang secara formal dan potensial memiliki peranan penting dan strategis bagi pembinaan generasi muda, khususnya bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup dalam suatu tempat dalam ikatan aturan tertentu (Hoetomo, 2005:336).

Kemitraan antara sekolah dan masyarakat merupakan hubungan kerja sama antara sekolah dan masyarakat dalam upaya pengembangan sekolah. Sekolah dan masyarakat tidak bisa dipisahkan karena keduanya memiliki kepentingan. Sekolah bertugas mendidik, melatih dan membimbing generasi muda, sementara masyarakat pengguna jasa pendidikan.

Hubungan kemitraan sekolah dan masyarakat bertujuan antara lain, 1) memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak, 2) memperkuat tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat, 3) menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan

kerja sama dengan sekolah. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, pihak sekolah dapat melakukan banyak cara untuk menarik simpati masyarakat terhadap sekolah dan menjalin hubungan kemitraan yang harmonis dengan masyarakat.

Input, Untuk ketercapaian pendidikan bermutu, fungsional, produktif, efektif dan akuntabel, maka diperlukan beberapa hal yang terkait dengan input yang antara lain: Peserta didik ketenagaan, fasilitas, biaya, kurikulum, perencanaan dan evaluasi, hubungan sekolah masyarakat dan iklim sekolah yang memadai (Mulyasa : 2013).

Proses Pendidikan, Proses adalah suatu pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain dengan sengaja (Mulyasa, 2012). Pesan-pesan penting akan dapat ditangkap dan dicerna bila para pelaku pendidikan mampu mendesain secara interaktif dan sederhana. Proses pembelajaran (PBM) merupakan ujung tombak dari proses pendidikan, yang mana suatu kegiatan dilakukan oleh guru, berkaitan dengan materi ajar, berlangsung dan dikemas secara interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi serta merangsang peserta didik untuk berpikir, aktif, kreatif, dengan menggunakan berbagai pendekatan rahman dan rahim (kasih sayang serta penuh cinta).

Suatu proses agar keberhasilannya sesuai harapan, maka harus diawali dengan perencanaan (*planning*). Perencanaan yang baik akan

mendorong terselenggaranya proses yang ideal sehingga setiap pelaksanaan proses harus mengetahui unsur-unsur perencanaan, misal bagi seorang guru yang akan melaksanakan proses pembelajaran, maka guru tersebut harus menguasai unsur-unsur perencanaan proses pembelajaran yang baik, seperti :

- a) Kebutuhan peserta didik
- b) Kompetensi dasar
- c) Tujuan
- d) Strategi dll.

Tentunya sebaliknya, perencanaan yang kurang optimal hanyalah akan menghasilkan kegagalan, sebagaimana pepatah bijak mengatakan: “Gagal dalam perencanaan sama dengan merencanakan kegagalan” (fail to plan is plan to fail).

Output merupakan hasil dari proses, menghasilkan lulusan sesuai dengan standar tertentu dan tentunya diharapkan memenuhi keinginan masyarakat, orangtua dan pemerintah. Output pada dasarnya akan banyak dipengaruhi oleh input dan proses, keefektifan proses. Sistem input yang berkualitas tentu dapat menghasilkan output yang berkualitas pula. Teori Sistem informasi “ Gold in-Gold out” dapat digunakan dalam hal ini.

Suatu output dikatakan berkualitas apabila telah memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh Standar Nasional Pendidikan (SNP). Output pendidikan sebagai suatu sistem

sewajarnya dapat dicerminkan dari suatu prestasi mutu lulusan sekolah yang sejatinya merupakan suatu proses pembelajaran yang didukung oleh semua unsur baik dari level kementerian, dinas pendidikan propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, sampai pada kelembagaan persekolahan yang merupakan unit terkecil. Dengan kata lain, makro, meso dan mikro pendidikan secara bersama-sama menjalankan perannya sehingga menghasilkan output yang terstandar dengan baik.

Pemanfaatan lulusan, Outcome pendidikan merupakan keuntungan atau manfaat (*benefit*) yang dirasakan baik oleh siswa, yang menjadi keluaran (*output*) pendidikan, maupun bagi stakeholders pendidikan secara luas. Pada fase berikutnya, outcome pendidikan ini akan menghasilkan dampak (*effect*) bagi masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan yang bermutu akan menghasilkan outcome yang baik dan tentunya akan memiliki dampak yang baik pula.

Keberadaan institusi seperti Dewan Sekolah/Komite Sekolah yang didalamnya terdiri dari unsur-unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan dan perwakilan orang tua siswa sejatinya berperan dalam memberikan masukan-masukan yang tidak saja berupa material dan kesejahteraan guru, tetapi, yang paling penting, memikirkan dan mendorong bagaimana supaya sekolah bisa mencapai tujuan yang ditetapkan. Agar hasil lulusan memiliki outcome yang memadai. Oleh karenanya, dewan sekolah/komite

sekolah juga perlu ikut merumuskan, memberi masukan dan mengevaluasi visi, misi, strategi sekolah agar apa yang dihasilkan oleh sekolah relevan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

Kemitraan antar lembaga dapat dilaksanakan dalam bentuk formal (resmi), informal (tidak resmi), formal dan informal, dan formal bilateral atau multi lateral. Masing – masing bentuk kemitraan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Kemitraan Formal

Kemitraan formal adalah bentuk kerjasama yang didasarkan pada satu kesepakatan atau perjanjian yang sifatnya mengikat dan dituangkan dalam dokumen naskah bersama. Contoh bentuk kemitraan formal yang dilakukan dengan pihak-pihak lain di luar negeri antar institusi pendidikan dan pelatihan, misalnya kerjasama antar lembaga (bilateral) seperti Indonesia-Australia, Indonesia-Jepang, kerjasama dengan SEAMOLEC, dan lain-lain.

b) Kemitraan Informal

Kemitraan informal adalah kemitraan yang didasarkan kesepakatan yang tidak mengikat dan tidak dituangkan dalam dokumen naskah kerjasama, tetapi lebih merupakan sebagai wujud adanya cooperative, kebersamaan dan saling menghargai dan menghormati keberadaan dari lembaga masing-masing. Misalnya saling mengundang dalam acara-acara kegiatan seminar, lokakarya, dan saling mengadakan kunjungan antar lembaga yang melakukan

kemitraan. Pelaksanaan kemitraan informal dapat sewaktu-waktu berubah atau dihentikan karena perubahan pimpinan atau perubahan kebijakan dari pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan. Contoh: Kemitraan sekolah dengan sekolah.

c) Kemitraan formal dan informal

Kemitraan dengan masyarakat dapat digolongkan ke dalam kemitraan informal maupun formal, keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, masyarakat berhak menuntut pendidikan yang baik dan bermutu. Tetapi pada saat yang sama masyarakat juga berkewajiban berperan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan dengan menyumbangkan dana, daya, pikiran, tenaga, dan bentuk- bentuk lain bagi terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Dalam perkembangan saat ini dukungan dan peran serta masyarakat dalam menunjang pendidikan yang bermutu di sekolah masih beragam, umumnya dukungan masih bersifat fisik, namun ada juga kelompok masyarakat yang sudah membantu proses pembelajaran. Di sisi lain, masih ada sekolah yang kurang mampu dan mau mendekati masyarakat guna membantu program pendidikan dalam bidang fisik maupun pembelajaran.

d) Kemitraan formal bilateral atau multi lateral

Sesuai dengan tuntutan otonomi daerah, kemitraan yang berkaitan dengan formal bilateral atau multi lateral dalam hal

bantuan finansial (bantuan yang harus dikembalikan), perlu mempertimbangkan aspek kewenangan pusat dan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk terlaksananya kemitraan antar lembaga, baik lembaga yang berada di dalam maupun di luar negeri diperlukan program yang disusun untuk tercapainya kemitraan yang efektif dan berkesinambungan.

- 6) Sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah.

Kemitraan adalah adanya keinginan untuk berbagi tanggung jawab yang diwujudkan melalui perilaku hubungan dimana semua pihak yang terlibat saling bantu-membantu untuk mencapai tujuan bersama.. Masing-masing pihak yang bermitra memiliki posisi dan tanggung jawab yang sama. Hubungan atasan-bawahan tidak berlaku dalam konteks kemitraan. Masing-masing menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan tugas dan batas-batas wewenang yang dimiliki.

Contoh lembaga pemerintah yang menjalin kerjasama dengan sekolah atau yang berhubungan dengan pendidikan, yakni Lembaga kedinasan struktural seperti Pemerintah, DPR/DPRD, Dinas Pendidikan, Pengawas, Dewan Pendidikan, komite sekolah dan beberapa lainnya merupakan lembaga tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan.

Komponen masyarakat jika dipahami secara luas adalah perorangan, kelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak

langsung memiliki kepedulian dan kepentingan yang sama dalam pendidikan.

Contoh lembaga non-pemerintah yang dapat bekerjasama dengan sekolah, yakni Perguruan tinggi, Organisasi profesi guru, Ikatan Alumni, Konsultan pendidikan, Wartawan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pengacara, Kepolisian, Perusahaan produk segmentasi sekolah, seperti penerbit buku, LKS, seragam, alat tulis, perbankan, bimbingan belajar dan lainnya.

- 7) Kemitraan SMP/MTs/SMPLB atau yang setara dilakukan minimal dengan SMA/SMK/SMALB, MA/MAK, SD/MI atau yang setara, serta dunia usaha dan dunia industri.

Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dalam modul pemberdayaan Komite Sekolah menjelaskan bahwa yang dimaksud kemitraan dalam konteks hubungan resiprokal antara sekolah, keluarga dan masyarakat kemitraan bukan sekedar sekumpulan aturan main yang tertulis dan formal atau suatu kontrak kerja melainkan lebih menunjukkan perilaku hubungan yang bersifat intim antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama dengan Dunia Usaha/ Dunia Industri yaitu saling membantu, saling mengisi dan saling melengkapi untuk meraih keuntungan bersama.

Dalam arti luas industri adalah suatu bidang yang bersifat komersial yang menggunakan keterampilan kerja serta teknologi

untuk menghasilkan suatu produk dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Produk industri tidak hanya berupa barang (manufaktur) tetapi juga dalam bentuk jasa (pelayanan), contoh hasil produksi dalam bentuk jasa seperti misalnya perbankan, asuransi, transportasi, jasa pengiriman barang dan sebagainya. Jika diartikan secara general, usaha merupakan setiap aktivitas yang dilakukan manusia untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jika diartikan secara khusus, istilah usaha dapat diartikan ke dalam banyak makna dan sangat bergantung dengan di mana istilah usaha ini digunakan. Di bidang bisnis misalnya, usaha biasanya identik dengan aktivitas bisnis.

Dunia industri merupakan suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.

Jenis-jenis industri berdasarkan klasifikasi atau penjenisannya, berdasarkan SK Menteri perindustrian No.19/M/I/1986, yaitu :

- a) Industri kimia dasar, contohnya seperti industri semen, obat-obatan, kertas, dan pupuk.
- b) Industri mesin dan logam dasar, misalnya seperti industri pesawat terbang, kendaraan bermotor, dan tekstil.
- c) Industri kecil, contohnya seperti industri roti, kompor minyak, makanan ringan, es, dan minyak goreng curah.

d) Aneka industri, contohnya seperti industri pakaian, industri makanan dan minuman.

Jenis-jenis industri berdasarkan produktifitas perorangan, yaitu :

a) Industri primer adalah industri yang barang-barang produksinya bukan hasil olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu. Contohnya adalah hasil produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan sebagainya.

b) Industri sekunder adalah industri yang bahan mentah diolah sehingga menghasilkan barang-barang untuk diolah kembali. Misalnya adalah pemintalan benang sutera, komponen elektronik, dan sebagainya.

c) Industri tersier adalah industri yang produk atau barangnya berupa layanan jasa. Contoh seperti telekomunikasi, transportasi, perawatan kesehatan, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Menurut Gunawan Widjaja dalam bukunya “*Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis*”(2004:hal.1), dunia usaha adalah dunia yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Setiap individu yang menjalankan usaha, senantiasa mencari jalan untuk selalu memperoleh sesuatu yang menguntungkan dari sebelumnya. Adapun pengertian lain mengatakan bahwa dunia usaha dapat diartikan sebagai suatu lingkup yang di dalamnya terdapat kegiatan produksi, distribusi dan upaya-upaya lain yang diarahkan pada pemuasan maksimal keinginan dan kebutuhan manusia. Pada dasarnya dunia usaha ialah ruang lingkup

yang didalanya terdapat kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari manusia dan senantiasa mencari atau memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.

Dalam dunia usaha terdapat berbagai jenis usaha, yakni diantaranya:

a) Usaha Ekstraktif

Usaha ekstraktif adalah jenis usaha yang mengambil dan memanfaatkan secara langsung kekayaan yang tersedia di alam. Contohnya yaitu, penangkapan ikan dan penambangan.

b) Usaha Agraris

Perusahaan Agraris adalah perusahaan yang usahanya mengolah dan memanfaatkan tanah agar menjadi lahan yang berdayaguna dan berhasil guna untuk memenuhi kebutuhan. Perusahaan agraris meliputi pertanian, perkebunan, perikanan (pemerihara ikan), dan peternakan. Perusahaan pertanian ialah perusahaan yang usahanya mengolah tanah menjadi lahan pertanian, kemudian ditanami tumbuh-tumbuhan agar menghasilkan bahan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya: pertanian padi, kacang tanah, hortikultura, perkebunan karet, kopi, dan kelapa sawit.

c) Usaha Industri

Usaha Industri adalah jenis usaha untuk menghasilkan barang baru, mengolah bahan baku, bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, atau barang jadi. Bentuk usaha industri diantaranya perusahaan mobil, tekstil, sepatu, dan industri bahan pangan. Contoh usaha dari bahan mentah adalah Usaha kerajinan rotan dan daun pandan. Usaha ini mengolah bahan mentah menjadi barang-barang jadi, berupa anyaman dan mebel seperti kursi dan meja, Industri pengolahan kulit, seperti kulit sapi atau kulit kambing. Industri ini mengolah kulit menjadi bahan setengah jadi berupa kulit samakan, Industri pembuat sepatu, tas, jaket, dan ikat pinggang. Industri ini menggunakan bahan setengah jadi atau bahan baku berupa kulit samakan.

d) Usaha jasa

Usaha jasa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa untuk para konsumen (pemakai) dengan memperoleh imbalan. Contohnya: jasa bank, jasa seorang dokter dan jasa seorang penjahit.

e) Usaha Dagang

Usaha dagang adalah orang yang menjual barang tertentu. Barang yang dijual berupa kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan lainnya. Hampir semua jenis barang diperdagangkan, misalnya makanan minuman (pangan), sandang, perhiasan dan

hewan. Perusahaan penghasil barang tidak akan secara langsung menjual barang hasil produksinya kepada konsumen. Mereka membutuhkan perantara, perantara inilah yang disebut pedagang. Sebelum sampai ke konsumen, barang hasil produksi melewati mata rantai yang panjang.

8) Sistem kemitraan sekolah ditetapkan dengan perjanjian tertulis.

Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang berkaitan dengan hukum dan perbuatan yang berkaitan dengan akibat hukum. Perjanjian juga bisa disebut sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yaitu akibat-akibat hukum yang merupakan konsekuensi. Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan sesuatu yaitu memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang disebut prestasi.

Pengertian Perjanjian Kerjasama dapat kita lihat yaitu Suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus (*Black's Law Dictionary*).

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada pihak lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Melalui perjanjian terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing

masing pihak yang membuat perjanjian. Sebuah sekolah tidak akan bisa sukses tanpa kerjasama dengan lembaga lain. Karena kerjasama yang direncanakan matang akan meningkatkan pengalaman belajar siswa di dunia nyata atau membuat sebuah kegiatan di sekolah makin bermakna. Sekolah tidak boleh mengandalkan kerjasama dengan pihak lain diluar sekolah hanya dengan andalkan kedekatan orang per orang di sekolahnya. Kepala sekolah bisa berganti ganti demikian juga guru yang bertugas di kepanitiaan sebuah acara di sekolah.

Sekolah bisa mempertahankan koneksi dengan pihak luar dengan cara membuat katalog kerja sama yang secara rutin di update. Katalog sangat berguna dalam merencanakan sebuah kegiatan dikarenakan disitu tertera copy dokumen MOU, nama, nomor kontak serta semua informasi yang diperlukan sekolah dalam membuat kontak demi mendapatkan kerja sama kemitraan dengan pihak lain.

Berdasarkan pengertian surat perjanjian di atas, surat ini berfungsi sebagai bukti otentik bahwa pihak-pihak tertentu telah melakukan perjanjian atau kesepakatan. Surat perjanjian juga menjadi dasar dalam melaksanakan hal-hal yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian. Surat perjanjian dapat dijadikan acuan ketika menggugat seseroang yang melanggar kesepakatan yang telah dibuat dalam surat perjanjian tersebut. Selain itu surat perjanjian berguna untuk :

- a) Menciptakan rasa tenang bagi pihak-pihak yang berjanji karena ada kepastian di dalam surat perjanjian
- b) Mengetahui dengan jelas batas hak dan kewajiban pihak yang bersepakat
- c) Menghindari perselisihan yang mungkin timbul di masa depan
- d) Sebagai acuan dalam menyelesaikan perselisihan atau perkara yang mungkin timbul akibat suatu perjanjian.

Sebuah surat perjanjian dapat dikatakan sah bila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Berikut ini adalah beberapa syarat sahnya surat perjanjian:

- a) Surat perjanjian harus ditulis di atas kertas segel atau kertas biasa yang dibubuhi dengan materai
- b) Surat perjanjian harus dibuat dengan ikhlas, rela dan tanpa paksaan dari manapun
- c) Isi surat perjanjian harus dimengerti dan disetujui oleh pihak-pihak yang saling bersepakat.
- d) Pihak-pihak yang saling bersepakat harus sudah dewasa serta dalam keadaan waras dan sadar saat membuat surat perjanjian tersebut.
- e) Isi surat perjanjian harus dibuat dengan jelas dan terperinci
- f) Isi surat perjanjian wajib tunduk kepada undang-undang dan norma susila yang berlaku.

Terdapat beberapa jenis surat perjanjian yang umum digunakan. Berikut ini adalah macam-macam surat perjanjian tersebut:

a) Surat Perjanjian Jual-Beli

Yakni surat perjanjian yang menyebutkan pihak penjual wajib menyerahkan suatu barang kepada pihak pembeli. Sebaliknya, pihak pembeli diwajibkan menyerahkan sejumlah uang (sebesar harga barang tersebut) kepada pihak penjual.

b) Surat Perjanjian Sewa Beli (Angsuran)

Yakni Surat perjanjian yang menyebutkan pembayaran dapat dilakukan secara mengangsur. Barang diserahkan ke pembeli setelah surat perjanjian ini ditandatangani, namun hak kepemilikan masih ada pada pihak penjual hingga cicilan lunas.

c) Surat Perjanjian Sewa Menyewa

Yakni Surat perjanjian yang berisi persetujuan antara penyewa dan yang menyewakan, dimana pihak penyewa membayar sejumlah uang atas pemakaian barang tertentu milik yang menyewakan (bangunan, tanah, dan lainnya).

d) Surat Perjanjian Borongan

Yakni Surat perjanjian yang dibuat antara pihak pemilik proyek dan pihak pemborong, dimana pihak pemborong bersedia dan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan borongan sesuai dengan syarat syarat/ spesifikasi serta waktu yang di tetapkan/ disepakati oleh kedua belah pihak.

e) Surat Perjanjian Meminjam Uang

Yakni Surat perjanjian yang dibuat antara pihak peminjam dan pemberi uang, dimana peminjam mendapatkan sejumlah uang pinjaman dari pihak piutang dan wajib mengembalikan uang tersebut dengan bunganya dalam waktu yang telah disepakati.

f) Surat Perjanjian Kerja

Yakni Surat perjanjian yang dibuat antara pemberi kerja dan pekerja. Dalam hal ini obyek dalam surat perjanjian kerja adalah jasa kerja atau pelayanan

B. Penelitian Relevan

1. Sri Setiyowati (2015) melakukan penelitian yang berjudul Manajemen Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat Di Taman Kanak-Kanak Se-Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman. Indikator dari penelitiannya adalah: (1) Perencanaan Humas, (2) Pelaksanaan Humas, (3) Evaluasi Perencanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan Humas, Berdasarkan tabel data perencanaan indikator dengan persentase tertinggi berada pada penentuan tujuan kegiatan humas dan keterlibatan guru serta komite dalam penyusunan kegiatan humas dengan perolehan persentase masingmasing 85,7%, sedangkan indikator dengan persentase terendah berada pada penyusunan sarana dan prasarana yakni 58,5%. (2) Pelaksanaan Humas, indikator pelaksanaan humas dengan persentase tertinggi berada pada pengkomunikasian kegiatan humas dengan persentase 84,2% sedangkan, indikator dengan persentase terendah berada

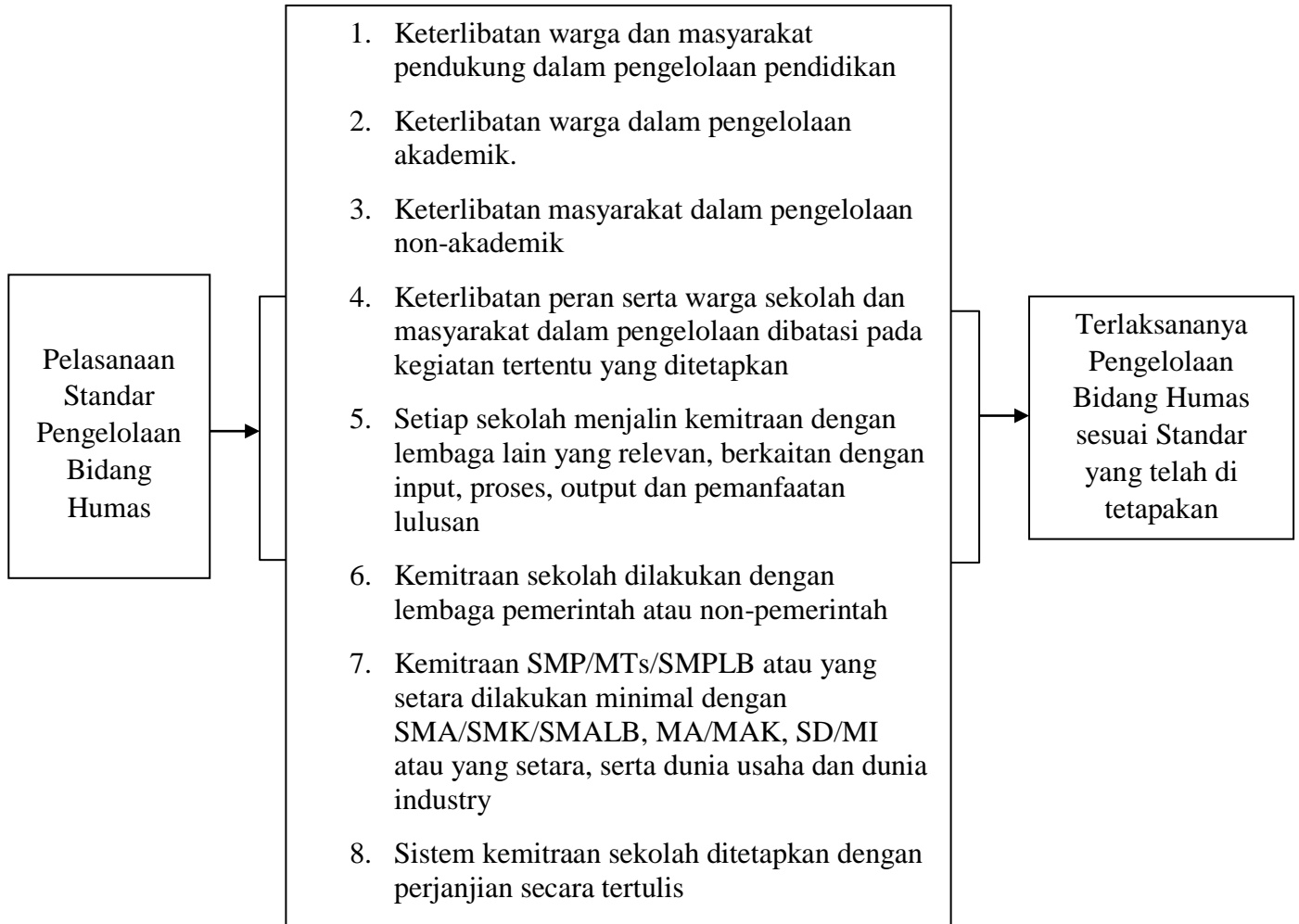
pada penggunaan sarana dan prasarana humas dengan persentase 65,5%.

(3) Evaluasi Humas, Pada aspek evaluasi ini persentase indikator tertinggi berada pada waktu evaluasi humas yakni 78,9% hal ini berarti bahwa TK se-Kecamatan Melati sudah melaksanakan evaluasi pada waktu tertentu yakni pada saat pelaksanaan humas dan akhir tahun ajaran, sedangkan persentase terendah berada pada penggunaan teknik evaluasi yakni 59,9%.

C. Kerangka konseptual

Untuk mengetahui bagaimana kualitas pengelolaan humas sekolah, secara sistematis kerangka konseptual penelitian ini memperlihatkan pengelolaan humas yang meliputi keterlibatan warga dan masyarakat pendukung dalam pengelolaan pendidikan, keterlibatan warga dalam pengelolaan akademik, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan non-akademik.

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011: 11) menjelaskan bahwa “penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan variabel satu dengan yang lain”. Dengan demikian, penelitian ini akan mendeskripsikan dan menafsirkan data yang berhubungan dengan kualitas pendidikan berdasarkan Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara.

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Berdasarkan masalah yang akan diteliti, maka dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel, yaitu: Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pengelolaan humas adalah proses dalam menangani perencanaan, pengorganisasian, pengomunikasian serta pengordinasian secara sungguh-sungguh dan rasional dalam upaya pencapaian

tujuan bersama dari organisasi atau lembaga yang diwakilinya. Untuk merealisasikan itu, banyak hal yang harus dilakukan oleh humas dalam lembaga pendidikan. kegiatan Variabel penelitian terdiri dari delapan indikator yang meliputi: Sekolah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah dalam pengelolaan pendidikan, Warga sekolah dilibatkan dalam pengelolaan akademik, Masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam pengelolaan non-akademik, Keterlibatan peran serta warga sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan, Setiap sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output dan pemanfaatan lulusan, Kemitraan sekolah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah, Kemitraan SMP atau yang setara dilakukan minimal dengan SMA atau yang setara, serta dunia usaha dan dunia industri, dan Sistem kemitraan sekolah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis.

C. Populasi dan sampel

1. Populasi

Sugiyono (2011: 90-91) mengemukakan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sejalan dengan pernyataan tersebut menurut Arikunto (2014: 173) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.

Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/ sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.

Dengan demikian dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah Wakil Kepala Sekolah, Pegawai Tata Usaha dan Guru.

Gambaran populasi dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Populasi Penelitian di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara

No.	Nama Sekolah	Jabatan			
		Wakil Kepala Sekolah	Guru	Tata Usaha	Jumlah
1.	SMP N 7 Padang	3	47	12	62
2.	SMP N 25 Padang	3	63	10	76
3.	SMP N 40 Padang	1	18	2	21
	Jumlah	7	128	24	159

Sumber data : Website resmi SMP N 7 Padang, SMP N 25 Padang, dan SMP N 40 Padang

2. Sampel

Sugiyono (2010: 118) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sedangkan Arikunto (2014: 174) mengemukakan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *Proportional Stratified Random Sampling*. Menurut

Sugiyono (2010:120) mengatakan bahwa “Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional”.

Untuk memperoleh sampel penelitian, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi strata

Strata populasi dikelompokkan berdasarkan strata jabatan yaitu Wakil Kepala Sekolah, Pegawai Tata Usaha, dan Guru.

b. Menentukan ukuran sampel

Penentuan besarnya pengambilan sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin (dalam Umar, 2011:78), dituliskan bahwa rumus Slovin adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan: n = sampel

N = populasi

e = perkiraan tingkat kesalahan 10%

Berdasarkan rumus tersebut maka besarnya sampel penelitian dengan perkiraan kesalahan 10% adalah:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{159}{1 + 159 (10\%)^2}$$

$$n = \frac{159}{1 + 159 \cdot 0,01}$$

$$n = \frac{159}{1 + 1,59}$$

$$n = \frac{159}{3,59} = 44,28 \text{ atau } 45 \text{ orang}$$

Jadi, besar sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 69 orang responden.

Berdasarkan jumlah sampel tersebut, penarikan sampel kualifikasi pendidikan menggunakan rumus menurut Sugiyono (dalam Riduwan, 2010: 66) agar sampel proposional.

$$n_i = \frac{N_i}{N} \times n$$

Keterangan : n_i = Jumlah sampel menurut jabatan

N = Jumlah populasi seluruhnya

N_i = Jumlah populasi menurut jabatan

n = Jumlah sampel seluruhnya

Maka jumlah sampel untuk masing-masing menurut kualifikasi pendidikan adalah sebagai berikut:

1) Kualifikasi Jabatan Wakil Kepala Sekolah

$$n_i = \frac{N_i}{N} \times n = \frac{7}{159} \times 45 = 1,9 \approx 2$$

2) Kualifikasi Jabatan Guru

$$ni = \frac{Ni}{N} \times n = \frac{128}{159} \times 45 = 36,22 \approx 37$$

3) Kualifikasi Jabatan Pegawai Tata Usaha

$$ni = \frac{Ni}{N} \times n = \frac{24}{159} \times 45 = 7,07 \approx 8$$

Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah sampel pada kualifikasi pendidikan dalam penelitian ini adalah 47 orang setelah terjadinya pembulatan angka.

c. Menentukan jumlah sampel setiap bagian

Menurut Yusuf (2014: 162) untuk menentukan jumlah sampel pada tiap bidang agar proporsional, maka digunakan perbandingan antara jumlah tiap kelompok dibagi dengan jumlah total (jumlah populasi) dan dikalikan dengan sampel yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya maka dapat digunakan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Sampel sub kelompok} = \frac{\text{jumlah masing-masing kelompok}}{\text{jumlah total}} \times \text{besar sampel}$$

**Tabel 2. Jumlah Sampel Penelitian di di SMP Negeri
Kecamatan Padang Utara**

No.	Nama Sekolah	Jumlah Populasi		Perhitungan Sampel		Sampel	Total sampel
		Jabatan		Wakil Kepala Sekolah = 4 Guru = 53			
1.	SMP N 7 Padang	Wakil Kepala	3	$\frac{3}{159} \times 47 =$	0,88	1	52
		Guru	47	$\frac{47}{159} \times 47 =$	13,89	14	
		Tata Usaha	12	$\frac{12}{159} \times 47 =$	3,54	6	
2.	SMP N 25 Padang	Wakil Kepala	3	$\frac{3}{159} \times 47 =$	0,88	1	
		Guru	63	$\frac{63}{159} \times 47 =$	18,62	19	
		Tata Usaha	10	$\frac{10}{159} \times 47 =$	2,95	3	
3.	SMP N 40 Padang	Wakil Kepala	1	$\frac{1}{159} \times 47 =$	0,29	1	
		Guru	18	$\frac{18}{159} \times 47 =$	5,32	6	
		Tata Usaha	2	$\frac{2}{159} \times 47 =$	0,59	1	
Total							52

Jadi, dapat disimpulkan bahwa jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 52 orang.

D. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang diperoleh langsung dari responden atau yang menjadi subjek penelitian. Data yang

akan memberikan informasi tentang Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan masyarakat di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah Wakil Kepala Sekolah, Guru dan Staff di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara yang terpilih sebagai sampel.

E. Instrumen dan Pengembangannya

Instrumen penelitian atau alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner menurut Arikunto (2014:194) adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dan responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.

Skala pengukuran yang digunakan adalah Skala Likert. Menurut Sugiyono (2010: 134) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Alternatif jawaban yang digunakan yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Masing-masing diberikan skor sebagai berikut: Sangat Setuju (SS) diberi skor 5, Setuju (S) diberi skor 4, Kurang Setuju (KS) diberi skor 3, Tidak Setuju (TS) diberi skor 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1.

Penyusunan angket ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membuat kisi-kisi angket dengan cara:

- a. Menentukan variabel dan sub variabel yang akan diteliti
 - b. Menentukan indikator dari masing-masing sub variabel
 - c. Menyusun butir-butir pertanyaan (item) dari setiap indikator tersebut.
2. Mengkonsultasikan item-item yang disusun tersebut dengan dosen pembimbing.
 3. Melakukan uji coba angket dilaksanakan kepada 10 orang responden yang dilakukan kepada 10 orang guru diluar sampel yang ada.
 4. Menganalisis uji coba instrument untuk mengetahui validitas dan reliabilitas angket.
 - a. Uji Validitas

Menurut Arikunto (2010: 211) “validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen”. Untuk mencari validitas, digunakan rumus korelasi tata jenjang yang dikemukakan oleh Spearman dalam Arikunto (2010:321) seperti dibawah ini :

$$rho_{xy} = 1 - \frac{6 \sum D^2}{N(N^2 - 1)}$$

Keterangan : rhoxy =Validitas yang dicari

$\sum D^2$ = Daya beda skor maksimal dengan skor total

N = Jumlah responden

Kriteria dalam pengujian validitas adalah:

“jika r hitung > r tabel berarti valid”

“jika r hitung < r tabel berarti tidak valid”

Perhitungan Validitas angket sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Rho_{xy} &= \left[1 - \frac{6 \sum D^2}{N(N^2 - 1)} \right] \\ &= \left[1 - \frac{6 (18)}{10(10^2 - 1)} \right] \\ &= 1 - 0,109 \\ &= \mathbf{0,891} \end{aligned}$$

Jadi dari hasil perhitungan validitas di atas dapat diperoleh rho hitung = **0,891** sedangkan rho tabel dengan N = 10 pada taraf kepercayaan 95% adalah 0,648. Jadi rho hitung > rho tabel yaitu **0,891 > 0,648** maka instrument penelitian ini adalah **valid**.

b. Uji Reliabilitas

Menurut Arikunto (2014:221) reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen itu sudah baik atau valid. Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah baik dapat dipercaya juga. Apabila datanya sesuai dengan kenyataan maka berapa kalipun diambil tetap akan sama. Untuk mencari reliabilitas angket digunakan rumus Alpha Cronbach yang dikemukakan oleh Arikunto (2010:329) yaitu:

$$r_{11} = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right)$$

Keterangan: r_{11} = Reliabilitas Instrumen

$\sum \sigma_b^2$ = Jumlah Varian Butir

σ_t^2 = Jumlah Varian Total

k = Banyaknya Butir Pertanyaan

kriteria dalam pengujian reliabilitas adalah:

“jika r hitung > r tabel berarti reliabel”

“jika r hitung < r tabel berarti tidak reliabel”

Mencari reliabilitas instrument dengan menggunakan rumus Alpha:

$$\begin{aligned} r_{11} &= \left(\frac{k}{(k-1)} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right) \\ &= \left(\frac{63}{63-1} \right) \left(1 - \frac{58,05}{2167,41} \right) \\ &= \left(\frac{63}{62} \right) (1 - 0,026) \\ &= (1,01)(0,974) \\ &= \mathbf{0,983} \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan reliabilitas diperoleh r hitung = **0,983** dan r tabel dengan taraf kepercayaan 95%, dengan N = 10 adalah **0,648** (N=10) karena r hitung > r tabel (**0,983 > 0,648**), maka instrument penelitian ini adalah **reliabel**.

F. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan setelah hasil analisis data uji coba angket dinyatakan valid dan reliabel. Pengumpulan data akan dilakukan dengan cara:

1. Mengurus surat izin penelitian dari jurusan yang diteruskan ke fakultas.
2. Setelah surat izin selesai, penulis mengunjungi instansi yang telah ditetapkan sebagai sampel penelitian untuk meminta izin melaksanakan penelitian.
3. Menyebarkan angket penelitian kepada responden terpilih.
4. Mengumpulkan kembali angket yang telah diisi oleh responden.

G. Teknik Analisis Data

1. Pemberian Skor

Pada setiap angket yang telah diedarkan, setiap alternatif jawaban dari angket diberi skor positif untuk jawaban Sangat Setuju (SS) diberi skor 5, Setuju (S) diberi skor 4, Kurang Setuju (KS) diberi skor 3, Tidak Setuju (TS) diberi skor 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1. Sedangkan untuk butir yang negatif untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1, Tidak Setuju (TS) diberi skor 2, Kurang Setuju (KS) diberi skor 3, Setuju (S) diberi skor 4, dan Sangat Setuju (SS) diberi skor 5.

2. Prosedur analisis data

Data yang berasal dari angket penelitian, setelah terkumpul selanjutnya diolah dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Melakukan verifikasi data

Verifikasi data dilakukan dengan cara memeriksa semua angket yang telah diisi, dilakukan dengan mengecek kebenaran dan kelengkapannya.

- b. Pengelompokkan butir pertanyaan berdasarkan indikator
- c. Membuat tabel persiapan untuk tabulasi data
- d. Menghitung frekuensi dari masing-masing alternative jawaban yang diberikan dalam bentuk tabel
- e. Menghitung rata-rata skor jawaban dengan menggunakan rumus rata-rata (mean)

Rumusnya adalah:

$$M = \frac{\sum fx}{N}$$

Keterangan : M = skor rata-rata yang dicari

f = frekuensi jawaban responden

x = pilihan jawaban

N = jumlah responden

\sum = jumlah

- f. Mendeskripsikan data yang telah diolah dalam tabel

Membuat standar kategori tentang Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara dengan menggunakan perhitungan skor rata-rata item pernyataan dan dikelompokkan dengan menggunakan kategori sebagai berikut (Widodo, 2004: 78).

Tabel 3. Skala Kategori Penilaian

Mean	Kategori
4,6 – 5	Sangat Baik
3,6 – 4,5	Baik
2,6 – 3,5	Cukup Baik
1,6 – 2,5	Kurang Baik
1 – 1,5	Tidak Baik

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan deskripsi data hasil penelitian dan pembahasan tentang Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat Di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara dilihat dari indikator :

- 1) Sekolah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah dalam pengelolaan pendidikan,
- 2) Warga sekolah dilibatkan dalam pengelolaan akademik,
- 3) Masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam pengelolaan non-akademik,
- 4) Keterlibatan peran serta warga sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan,
- 5) Setiap sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output dan pemanfaatan lulusan,
- 6) Kemitraan sekolah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah,
- 7) Kemitraan SMP atau yang setara dilakukan minimal dengan SMA atau yang setara, serta dunia usaha dan dunia industri,
- 8) Sistem kemitraan sekolah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis.

Berikut ini akan penulis kemukakan deskripsi hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat Di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara.

1. Sekolah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah dalam pengelolaan pendidikan.

Data mengenai Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat Di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara yang

dilihat dari aspek keterlibatan warga dan masyarakat pendukung sekolah dalam pengelolaan pendidikan diuraikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel. 4 Deskripsi Data Dari Aspek Keterlibatan Warga Dan Masyarakat Pendukung Sekolah Dalam Pengelolaan Pendidikan

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban										Jumlah		Rata-Rata	Kategori
		SL		SR		KK		JR		TP		F	Fx		
		F	Fx	F	Fx	F	Fx	F	Fx	F	Fx				
A. Sekolah Melibatkan Warga dan Masyarakat Pendukung Sekolah dalam Pengelolaan Pendidikan															
1	Menyusun rencana pengembangan sekolah untuk 4/5 tahun	14	70	24	96	13	39	0	0	1	1	52	206	3.96	Baik
2	Menyusun rencana kerja tahunan sekolah	11	55	21	84	15	45	3	6	2	2	52	192	3.69	Baik
3	Menyusun rencana kerja dan anggaran sekolah	8	40	17	68	22	66	4	8	1	1	52	183	3.52	Cukup Baik
4	Menyusun rencana pelaksanaan program kerja sekolah	12	60	15	60	18	54	6	12	1	1	52	187	3.60	Cukup Baik
5	Diminta masukan ide/gagasan melalui rapat resmi dalam merencanakan sekolah	3	15	22	88	21	63	6	12	0	0	52	178	3.42	Cukup Baik
6	Menentukan organisasi/tim/orang-orang yang akan melaksanakan program kerja sekolah	7	35	18	72	21	63	3	6	3	3	52	179	3.44	Cukup Baik
7	Diminta masukan ide/dukungan pemikiran dalam pelaksanaan program sekolah	8	40	21	84	16	48	2	4	5	5	52	181	3.48	Cukup Baik
8	Bapak dan ibu dilibatkan dalam memantau pelaksanaan program kerja sekolah	6	30	25	100	17	51	0	0	4	4	52	185	3.56	Cukup Baik
9	Bapak dan ibu dilibatkan dalam menilai keterlaksanaan / keberhasilan program kerja sekolah	15	75	19	76	16	48	2	4	0	0	52	203	3.90	Baik
10	Diminta masukan ide/gagasan melalui rapat pengawasan informal dalam mengevaluasi program kerja sekolah	7	35	19	76	18	54	3	6	5	5	52	176	3.38	Cukup Baik
													3.60	Cukup Baik	

Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa skor rata-rata tertinggi dari aspek keterlibatan warga dan masyarakat pendukung sekolah dalam pengelolaan pendidikan adalah dalam menyusun rencana pengembangan sekolah untuk

4/5 tahun dengan skor rata-rata 3.96. Sedangkan skor rata-rata terendah dari aspek keterlibatan warga dan masyarakat pendukung sekolah dalam pengelolaan pendidikan adalah dilibatkan dalam memantau pelaksanaan program kerja sekolah dengan skor rata-rata 3.29.

Secara keseluruhan Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat Di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara ditinjau dari aspek keterlibatan warga dan masyarakat pendukung sekolah dalam pengelolaan pendidikan mendapat skor rata-rata 3.58. Skor ini berada pada kategori cukup baik. Artinya keterlibatan warga dan masyarakat pendukung sekolah dalam pengelolaan pendidikan di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara bisa dikatakan belum terlalu baik.

2. Warga sekolah dilibatkan dalam pengelolaan akademik.

Data mengenai Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat Di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara yang dilihat dari Keterlibatan warga sekolah dalam pengelolaan akademik diuraikan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Deskripsi dari Aspek Keterlibatan Warga Sekolah Dalam Pengelolaan Akademik

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban										Jumlah		Rata-Rata	Kategori
		SL		SR		KK		JR		TP		F	Fx		
		F	Fx	F	Fx	F	Fx	F	Fx	F	Fx				
B. Warga sekolah dilibatkan dalam pengelolaan akademik															
11	Menyusun kalender akademik	11	55	17	68	22	66	1	2	1	1	52	192	3.69	Baik
12	Mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau sekolah	10	50	27	108	13	39	2	4	0	0	52	201	3.87	Baik
13	Menentukan pembagian tugas mengajar guru	9	45	28	112	12	36	3	6	0	0	52	199	3.83	Baik
14	Penyusunan jadwal pembelajaran	11	55	20	80	16	48	5	10	0	0	52	193	3.71	Baik
15	Pengembangan perangkat pembelajaran	15	75	21	84	13	39	2	4	1	1	52	203	3.90	Baik
16	Memantau pelaksanaan program akademik	16	80	21	84	15	45	0	0	0	0	52	209	4.02	Baik
17	Menilai keberhasilan pelaksanaan program akademik	20	100	21	84	9	27	1	2	1	1	52	214	4.12	Baik
18	Melaksanakan tindak lanjut dari hasil pengawasan bidang akademik	11	55	22	88	15	45	4	8	0	0	52	196	3.77	Baik
19	Sebagai pelaksana program akademik dalam mengelola program akademik	12	60	31	124	9	27	0	0	0	0	52	211	4.06	Baik
													3.88	Baik	

Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa skor rata-rata tertinggi dari aspek keterlibatan warga sekolah dalam pengelolaan akademik adalah menilai keberhasilan pelaksanaan program akademik dengan skor rata-rata 4.12. Sedangkan skor rata-rata terendah dari aspek keterlibatan warga sekolah dalam pengelolaan akademik adalah menyusun kalender akademik dengan skor rata-rata 3.69.

Secara keseluruhan Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat Di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara ditinjau

dari aspek keterlibatan warga sekolah dalam pengelolaan akademik mendapat skor rata-rata 3.88. Skor ini berada pada kategori baik. Artinya keterlibatan warga sekolah dalam pengelolaan akademik di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara bisa dikatakan baik.

3. Masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam pengelolaan non-akademik.

Data mengenai Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat Di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara yang dilihat dari Keterlibatan masyarakat pendukung sekolah dalam pengelolaan non akademik diuraikan pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Deskripsi Data dari Aspek Keterlibatan Masyarakat Pendukung Sekolah Dalam Pengelolaan Non Akademik

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban										Jumlah		Rata-Rata	Kategori
		SL		SR		KK		JR		TP					
		F	Fx	F	Fx	F	Fx	F	Fx	F	Fx	F	Fx		
C. Masyarakat Pendukung Sekolah dilibatkan dalam Pengelolaan Non Akademik															
20	Mengembangkan program ekstrakurikuler sekolah	20	100	23	92	6	18	3	6	0	0	52	216	4.15	Baik
21	Menentukan pembagian tugas guru dalam membimbing siswa pada kegiatan ekstrakurikuler	14	70	24	96	11	33	3	6	0	0	52	205	3.94	Baik
22	Menyusun jadwal kegiatan ekstrakurikuler	15	75	27	108	8	24	2	4	0	0	52	211	4.06	Baik
23	Pelaksanaan program non akademik / ekstrakurikuler	10	50	26	104	11	33	4	8	1	1	52	196	3.77	Baik
24	Memantau pelaksanaan program non akademik / ekstrakurikuler	8	40	26	104	16	48	2	4	0	0	52	196	3.77	Baik
25	Menilai keberhasilan pelaksanaan program non akademik / ekstrakurikuler	10	50	25	100	15	45	1	2	1	1	52	198	3.81	Baik
26	Melaksanakan tindak lanjut dari hasil pengawasan bidang non akademik / ekstrakurikuler	13	65	29	116	6	18	4	8	0	0	52	207	3.98	Baik
27	Memberi ide/masukan secara informal dalam pengelolaan program non akademik	12	60	28	112	6	18	6	12	0	0	52	202	3.88	Baik
													3.92	Baik	

Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa skor rata-rata tertinggi dari aspek keterlibatan masyarakat pendukung sekolah dalam pengelolaan non akademik adalah masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam mengembangkan ekstrakurikuler dengan skor rata-rata 4.15. Sedangkan skor rata-rata terendah dari aspek keterlibatan masyarakat pendukung sekolah dalam pengelolaan non akademik adalah masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam pelaksanaan program non akademik / ekstrakurikuler dan memantau pelaksanaan program non akademik / ekstrakurikuler dengan skor yang sama rata-rata 3.77.

Secara keseluruhan Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat Di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara ditinjau dari aspek keterlibatan masyarakat pendukung sekolah dalam pengelolaan non akademik mendapat skor rata-rata 3.92. Skor ini berada pada kategori baik. Artinya keterlibatan masyarakat pendukung sekolah dalam pengelolaan non akademik di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara bisa dikatakan baik.

4. Keterlibatan peran serta warga sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan

Data mengenai Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat Di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara yang dilihat dari keterlibatan peran serta warga sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan diuraikan pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Deskripsi Data dari Aspek Keterlibatan peran serta warga sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban										Jumlah		Rata-Rata	Kategori
		SL		SR		KK		JR		TP					
		F	Fx	F	Fx	F	Fx	F	Fx	F	Fx	F	Fx		
D. Keterlibatan peran serta warga sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan.															
28	Merencanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang belum terprogram di sekolah	8	40	12	48	27	81	5	10	0	0	52	179	3.44	Cukup Baik
29	Melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu di sekolah	10	50	14	56	23	69	5	10	0	0	52	185	3.56	Cukup Baik
30	Melaksanaan kegiatan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan	11	55	17	68	20	60	4	8	0	0	52	191	3.67	Baik
31	Merencanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang belum terprogram di sekolah	6	30	17	68	21	63	7	14	1	1	52	176	3.38	Cukup Baik
32	Melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu di sekolah	9	45	19	76	21	63	0	0	3	3	52	187	3.60	Cukup Baik
33	Melaksanakan kegiatan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan sekolah	13	65	24	96	10	30	2	4	3	3	52	198	3.81	Baik
													3.58	Cukup Baik	

Pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa skor rata-rata tertinggi dari aspek keterlibatan peran serta warga sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan adalah masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam kegiatan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan sekolah dengan skor rata-rata 3.81. Sedangkan skor rata-rata terendah dari aspek keterlibatan peran serta warga sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan

tertentu yang ditetapkan adalah merencanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang belum terprogram di sekolah dengan skor rata-rata 3.44.

Secara keseluruhan Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat Di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara ditinjau dari keterlibatan peran serta warga sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu mendapat skor rata-rata 3.58. Skor ini berada pada kategori cukup baik. Artinya keterlibatan peran serta warga sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara bisa dikatakan belum terlalu baik.

5. Setiap sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output dan pemanfaatan lulusan

Data mengenai Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara di tinjau dari aspek sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output dan pemanfaatan lulusan diuraikan pada tabel 8 berikut :

Tabel 8. Deskripsi Data dari Aspek Sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output dan pemanfaatan lulusan

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban										Jumlah		Rata-Rata	Kategori
		SL		SR		KK		JR		TP					
		F	Fx	F	Fx	F	Fx	F	Fx	F	Fx	F	Fx		
E. Setiap sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output, dan pemanfaatan lulusan															
34	Menjalin kerjasama dengan SD/MI/setara untuk mempersiapkan calon peserta didik pada tahun ajaran baru	18	90	25	100	8	24	0	0	0	0	51	214	4.20	Baik
35	Menjalin kerjasama dengan lembaga bimbingan belajar untuk meningkatkan kualitas belajar siswa	16	80	19	76	8	24	8	16	8	8	59	204	3.46	Cukup Baik
36	Menjalin kerjasama dengan SMP/Mts/setara untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang telah diprogramkan	18	90	20	80	7	21	7	14	7	7	59	212	3.59	Cukup Baik
37	Menjalin kerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) untuk pemetaan mutu pendidikan	20	100	23	92	8	24	1	2	1	1	53	219	4.13	Baik
38	Menjalin kerjasama dengan SMA/SMK/setara untuk melanjutkan pendidikan kejenjang berikutnya	18	90	26	104	4	12	4	8	4	4	56	218	3.89	Baik
													3.85	Baik	

Dari tabel 8 dapat dilihat bahwa skor rata-rata tertinggi dari aspek sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output dan pemanfaatan lulusan adalah sekolah menjalin kerjasama dengan SD/MI/setara untuk mempersiapkan calon peserta didik pada tahun ajaran baru dengan skor rata-rata 4.20. Sedangkan skor rata-rata terendah dari aspek sekolah menjalin kemitraan dengan

lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output dan pemanfaatan lulusan adalah sekolah menjalin kerjasama dengan lembaga bimbingan belajar untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan skor rata-rata 3.46.

Secara keseluruhan Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat Di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara ditinjau dari setiap sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output dan pemanfaatan lulusan mendapat skor rata-rata 3.85. Skor ini berada pada kategori baik. Artinya setiap sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output dan pemanfaatan lulusan di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara bisa dikatakan baik.

6. Kemitraan sekolah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah

Data mengenai Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara di tinjau dari aspek kemitraan sekolah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah diuraikan pada tabel 9 berikut :

Tabel 9. Kemitraan sekolah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban										Jumlah		Rata-Rata	Kategori
		SL		SR		KK		JR		TP		F	Fx		
		F	Fx	F	Fx	F	Fx	F	Fx	F	Fx				
F. Kemitraan sekolah dilakukan dengan lembaga pemerintah/non pemerintah															
39	Menjalin kerjasama dengan lembaga Dinas Pendidikan dalam membantu pengelolaan sekolah	24	120	19	76	8	24	1	2	1	1	53	223	4.21	Baik
40	Menjalin kerjasama dengan lembaga Dinas Pemuda dan Olahraga dalam membantu mengelola non-akademik / ekstrakurikuler sekolah	18	90	23	92	11	33	0	0	0	0	52	215	4.13	Baik
41	Menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam rangka mengembangkan kemampuan siswa bidang Palang Merah Remaja	20	100	23	92	8	24	1	2	1	1	53	219	4.13	Baik
42	Menjalin kerjasama dengan Kepolisian untuk mensosialisasikan tentang narkoba dan tata tertib lalu lintas	13	65	28	112	11	33	0	0	0	0	52	210	4.04	Baik
43	Menjalin kerjasama dengan pihak industri komunikasi guna kemajuan sekolah di mata publik	20	100	24	96	7	21	1	2	1	1	53	220	4.15	Baik
44	Sekolah menjalin kerjasama dengan ikatan alumni sekolah guna menjalin silaturahmi antara alumni dengan sekolah	21	105	19	76	9	27	3	6	3	3	55	217	3.95	Baik
45	Menjalin kerjasama dengan bimbingan belajar untuk meningkatkan pengetahuan	17	85	18	72	13	39	3	6	3	3	54	205	3.80	Baik
46	Menjalin kerja sama dengan Lembaga Test Psikologi/Test IQ dalam rangka mengarahkan siswa untuk memilih minat/jurusan pada jejang pendidikan selanjutnya	11	55	33	132	7	21	1	2	1	1	53	211	3.98	Baik
													4.05	Baik	

Dari tabel 9 dapat dilihat bahwa skor rata-rata tertinggi dari aspek kemitraan sekolah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah adalah sekolah menjalin kerjasama dengan lembaga Dinas Pendidikan dalam membantu pengelolaan sekolah dengan skor rata-rata 4.21. Sedangkan skor rata-rata terendah dari aspek sekolah menjalin kerjasama dengan pihak industri komunikasi guna kemajuan sekolah di mata publik dengan skor rata-rata 3.77.

Secara keseluruhan Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat Di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara ditinjau dari kemitraan sekolah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah mendapat skor rata-rata 4.05. Skor ini berada pada kategori baik. Artinya kemitraan sekolah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara bisa dikatakan baik.

7. Kemitraan SMP atau yang setara dilakukan minimal dengan SMA atau yang setara, serta dunia usaha dan dunia industri

Data mengenai Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara di tinjau dari aspek kemitraan SMP atau yang setara dilakukan minimal dengan SMA atau yang setara, serta dunia usaha dan dunia industry diuraikan pada tabel 10 berikut :

Tabel 10. Deskripsi Data dari Aspek Kemitraan SMP/MTs/SMPLB atau yang setara dilakukan minimal dengan SMA/SMK/SMALB, MA/MAK, SD/MI atau yang setara, serta Dunia Usaha dan Dunia Industri

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban										Jumlah		Rata-Rata	Kategori
		SL		SR		KK		JR		TP		F	Fx		
		F	Fx	F	Fx	F	Fx	F	Fx	F	Fx				
G. Kemitraan SMP/MTs/SMPLB atau yang setara dilakukan minimal dengan SMA/SMK/SMALB, MA/MAK, SD/MI atau yang setara serta dunia usaha dan dunia industri.															
47	Menjalin kerjasama dengan usaha makanan agar mempermudah mensupply makanan yang aman untuk di konsumsi oleh siswa di sekolah	15	75	27	108	8	24	2	4	2	2	54	213	3.94	Baik
48	Menjalin kerjasama dengan pihak asuransi tertentu guna menjaga masa depan peserta didik secara fisik dan financial	10	50	26	104	11	33	4	8	4	4	55	199	3.62	Baik
49	Menjalin kerjasama dengan pihak konveksi dalam menyediakan seragam dan atribut sekolah untuk siswa agar lebih ekonomis	8	40	26	104	16	48	2	4	2	2	54	198	3.67	Baik
50	Menjalin kerjasama dengan distributor buku pelajaran ataupun buku tulis untuk ketersediaan buku-buku di sekolah	10	50	25	100	15	45	1	2	1	1	52	198	3.81	Baik
													3.76	Baik	

Dari tabel 10 dapat dilihat bahwa skor rata-rata tertinggi dari aspek kemitraan SMP atau yang setara dilakukan minimal dengan SMA atau yang setara, serta dunia usaha dan dunia industri adalah menjalin kerjasama dengan usaha makanan agar mempermudah mensupply makanan yang aman untuk di konsumsi oleh siswa di sekolah dengan skor rata-rata 3,94. Sedangkan skor rata-rata terendah dari aspek kemitraan SMP atau yang setara dilakukan minimal dengan SMA atau yang setara, serta dunia usaha dan dunia industri adalah menjalin kerjasama dengan

pihak asuransi tertentu guna menjaga masa depan peserta didik secara fisik dan financial dengan skor rata-rata 3.62.

Secara keseluruhan Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat Di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara ditinjau dari kemitraan SMP atau yang setara dilakukan minimal dengan SMA atau yang setara, serta dunia usaha dan dunia industri mendapat skor rata-rata 3.76. Skor ini berada pada kategori baik. Artinya kemitraan SMP atau yang setara dilakukan minimal dengan SMA atau yang setara, serta dunia usaha dan dunia industri di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara bisa dikatakan baik.

8. Sistem kemitraan sekolah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis

Data mengenai Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara di tinjau dari aspek sistem kemitraan sekolah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis diuraikan pada tabel 11 berikut :

Tabel 11. Deskripsi Data dari Aspek Sistem kemitraan sekolah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban										Jumlah		Rata-Rata	Kategori
		SL		SR		KK		JR		TP					
		F	Fx	F	Fx	F	Fx	F	Fx	F	Fx	F	Fx		
H. Sistem kemitraan sekolah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis															
51	Kerjasama dengan SD/MI/setara	13	65	29	116	6	18	4	8	4	4	56	211	3.77	Baik
52	Kerjasama dengan SMA/MA/SMK/setara	12	60	28	112	6	18	6	12	0	0	52	202	3.88	Baik
53	Kerjasama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga	11	55	24	96	15	45	1	2	1	1	52	199	3.83	Baik
54	Kerjasama dengan Dinas Kesehatan	15	75	19	76	14	42	4	8	0	0	52	201	3.87	Baik
55	Kerjasama dengan Pihak Kepolisian	12	60	19	76	14	42	3	6	4	4	52	188	3.62	Baik
56	Kerjasama dengan industri komunikasi	8	40	26	104	14	42	2	4	2	2	52	192	3.69	Baik
57	Kerjasama dengan alumni sekolah	9	45	30	120	11	33	2	4	0	0	52	202	3.88	Baik
58	Kerjasama dengan lembaga bimbingan belajar	7	35	31	124	13	39	1	2	0	0	52	200	3.85	Baik
59	Kerjasama dengan puskesmas	17	85	24	96	10	30	1	2	0	0	52	213	4.10	Baik
60	Kerjasama dengan usaha makanan dan minuman	9	45	18	72	8	24	3	6	0	0	38	147	3.87	Baik
61	Kerjasama dengan asuransi	5	25	17	68	12	36	4	8	0	0	38	137	3.61	Baik
62	Kerjasama dengan konveksi pakaian atau atribut peserta didik	5	25	21	84	10	30	2	4	0	0	38	143	3.76	Baik
63	Kerjasama dengan pihak distributor buku pelajaran atau buku tulis	7	35	29	116	14	42	2	4	0	0	52	197	3.79	Baik
													3.81	Baik	

Dari tabel 11 dapat dilihat bahwa skor rata-rata tertinggi dari aspek sistem kemitraan sekolah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis adalah sekolah melakukan kerjasama dengan puskesmas menggunakan surat perjanjian tertulis secara resmi dengan skor rata-rata 4.10. Sedangkan skor rata-rata terendah dari aspek sistem kemitraan sekolah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis adalah sekolah melakukan kerjasama

dengan asuransi menggunakan surat perjanjian tertulis secara resmi dengan skor rata-rata 3.61.

Secara keseluruhan Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat Di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara ditinjau dari sistem kemitraan sekolah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis mendapat skor rata-rata 3.81. Skor ini berada pada kategori baik. Artinya sistem kemitraan sekolah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara bisa dikatakan baik.

9. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara

Hasil pengolahan data mengenai Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat Di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara di tinjau dari Aspek Sekolah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah dalam pengelolaan pendidikan, Warga sekolah dilibatkan dalam pengelolaan akademik, Masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam pengelolaan non-akademik, Keterlibatan peran serta warga sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan, Setiap sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output dan pemanfaatan lulusan, Kemitraan sekolah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah, Kemitraan SMP/MTs/SMPLB atau yang setara dilakukan minimal dengan SMA/SMK/SMALB, MA/MAK, SD/MI atau yang setara, serta dunia usaha dan dunia industry, dan Sistem kemitraan sekolah

ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis. Dapat dilihat pada tabel 12 berikut :

Tabel 12. Rekapitulasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat Di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara

No	Indikator	Rata-rata	Kategori
1	Sekolah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah dalam pengelolaan pendidikan.	3.60	Cukup Baik
2	Warga sekolah dilibatkan dalam pengelolaan akademik.	3.88	Baik
3	Masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam pengelolaan non-akademik.	3.92	Baik
4	Keterlibatan peran serta warga sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan	3.58	Cukup Baik
5	Setiap sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output dan pemanfaatan lulusan	3.85	Baik
6	Kemitraan sekolah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah	4.05	Baik
7	Kemitraan SMP atau yang setara dilakukan minimal dengan SMA atau yang setara, serta dunia usaha dan dunia industri	3.76	Baik
8	Sistem kemitraan sekolah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis	3.81	Baik
Rata-rata		3.81	Baik

Dari tabel 12 dapat dilihat bahwa tingkat capaian tertinggi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat Di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara yaitu pada Kemitraan sekolah dilakukan

dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dengan skor rata-rata 4.05. Sedangkan tingkat capaian terendah yaitu Keterlibatan peran serta warga sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan dengan skor rata-rata 3.58.

Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat Di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara berada pada kategori baik dengan perolehan skor rata-rata 3.80.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan dikemukakan pembahasan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara yang meliputi dari aspek Sekolah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah dalam pengelolaan pendidikan, Warga sekolah dilibatkan dalam pengelolaan akademik, Masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam pengelolaan non-akademik, Keterlibatan peran serta warga sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan, Setiap sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output dan pemanfaatan lulusan, Kemitraan sekolah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah, Kemitraan SMP atau yang setara dilakukan minimal dengan SMA atau yang setara, serta dunia usaha dan dunia industry, dan Sistem kemitraan sekolah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis. Kemitraan sekolah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau

non-pemerintah mendapat skor tertinggi yaitu 4.05 dengan kategori baik. Sedangkan Keterlibatan peran serta warga sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan mendapat skor terendah yaitu 3.58 dengan kategori cukup baik. Untuk lebih jelasnya, pembahasan hasil penelitian ini akan diuraikan berdasarkan aspek di atas.

1. Sekolah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah dalam pengelolaan pendidikan.

Data yang digambarkan pada Tabel 4 mengenai Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat Di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara ditinjau dari aspek sekolah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah dalam pengelolaan pendidikan mendapat skor rata-rata 3.91 yang menunjukkan hasil yang Baik.

Dapat dilihat bahwa skor rata-rata tertinggi dari aspek keterlibatan warga dan masyarakat pendukung sekolah dalam pengelolaan pendidikan adalah dalam menyusun rencana pengembangan sekolah untuk 4/5 tahun dengan skor rata-rata 3.96. Sedangkan skor rata-rata terendah dari aspek keterlibatan warga dan masyarakat pendukung sekolah dalam pengelolaan pendidikan adalah dilibatkan dalam memantau pelaksanaan program kerja sekolah dengan skor rata-rata 3.29.

Dilihat dari aspek keterlibatan warga dan masyarakat pendukung sekolah dalam pengelolaan pendidikan, dalam menyusun rencana pengembangan sekolah untuk 4/5 tahun dengan skor rata-rata 3.96. Berarti sudah terlaksana dengan hasil yang baik. Sedangkan skor rata-rata

terendah dalam aspek keterlibatan warga dan masyarakat pendukung sekolah dalam pengelolaan pendidikan adalah dilibatkan dalam memantau pelaksanaan program kerja sekolah dengan skor rata-rata 3.29. Artinya pelaksanaan terhadap aspek yang mesti dikelola sudah terlaksana dengan baik.

Menurut Isbandi (2007:27) Keterlibatan atau partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Langkah yang dapat ditempuh agar semakin optimalnya pengelolaan pendidikan adalah sebaiknya pihak sekolah dalam melaksanakan berbagai kegiatan, khususnya dalam mengelola pendidikan tetap bersifat transparansi dan juga dalam melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah ataupun sekedar meminta masukan, saran, ataupun ide-ide yang membuat warga dan masyarakat pendukung sekolah juga merasa berpartisipasi dalam jalannya kegiatan mengelola pendidikan di sekolah.

2. Warga sekolah dilibatkan dalam pengelolaan akademik.

Data yang digambarkan pada Tabel 5 mengenai Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat Di SMP Negeri

Kecamatan Padang Utara ditinjau dari aspek Keterlibatan warga sekolah dalam pengelolaan akademik mendapat skor rata-rata 3.88 yang menunjukkan hasil yang Baik.

Dapat dilihat bahwa skor rata-rata tertinggi dari aspek keterlibatan warga dalam pengelolaan akademik adalah menilai keberhasilan pelaksanaan program akademik dengan skor rata-rata 4.12. Sedangkan skor rata-rata terendah dari aspek keterlibatan warga dalam pengelolaan akademik adalah menyusun kalender akademik dengan skor rata-rata 3.69.

Minimnya keterlibatan warga sekolah dalam penyusunan kalender akademik ini menunjukkan bahwa seluruh elemen sekolah belum diberi kesempatan yang sama untuk dapat berkontribusi khususnya dalam penyusunan kalender akademik. Ratnawatai (2015) Warga sekolah merupakan anggota sekolah berupa komponen hidup yang terdiri dari masukan sumber daya manusia, masukan lingkungan dan masukan mental. Dengan kata lain warga sekolah merupakan kepala sekolah, guru, tenaga tata usaha dan komite sekolah.

Selanjutnya dalam upaya mengatasi permasalahan ini hendaknya sekolah yang merupakan wadah bagi seluruh warga sekolah bisa saling berkolaborasi dan bekerja sama dalam mengelola kegiatan pendidikan untuk kemajuan sekolah khususnya disini dalam menyusun kalender akademik sekolah agar dilakukan secara bersama-sama dan melibatkan seluruh warga sekolah yang ada.

3. Masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam pengelolaan non-akademik.

Hasil penelitian pada tabel 6 menunjukkan bahwa Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat Di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara dilihat dari aspek keterlibatan masyarakat pendukung sekolah dalam pengelolaan non akademik berada pada kategori baik dengan skor rata-rata 3.92. yang mana sekolah harus mampu untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pengelolaan bidang hubungan masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan agar bisa menjadi lebih baik lagi.

Dapat dilihat bahwa skor rata-rata tertinggi dari aspek keterlibatan masyarakat pendukung sekolah dalam pengelolaan non akademik adalah masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam mengembangkan ekstrakurikuler dengan skor rata-rata 4.15. Sedangkan skor rata-rata terendah dari aspek keterlibatan masyarakat pendukung sekolah dalam pengelolaan non akademik adalah masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam pelaksanaan program non akademik / ekstrakurikuler dan memantau pelaksanaan program non akademik / ekstrakurikuler dengan skor yang sama rata-rata 3.77.

Solusi yang dapat dilakukan untuk permasalahan di atas sebaiknya pihak sekolah tidak hanya melibatkan warga sekolah saja namun juga ikut melibatkan masyarakat pendukung sekolah dalam melaksanakan program non akademik dan juga ikut membantu dalam mengawasi jalannya pelaksanaan program non akademik ini sesuai tupoksinya masing-masing.

Lestari (2017) Kegiatan non akademik di sekolah yang biasa disebut dengan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan-kegiatan ini ada pada setiap jenjang pendidikan dari sekolah dasar sampai universitas. Kegiatan ekstrakurikuler ditujukan agar siswa dapat mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuannya di berbagai bidang di luar bidang akademik. Kegiatan ini diadakan secara swadaya dari pihak sekolah maupun siswa-siswi itu sendiri untuk merintis kegiatan di luar jam pelajaran sekolah.

4. Keterlibatan peran serta warga sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan

Hasil penelitian pada Tabel 7, menunjukkan Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat Di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara dilihat dari keterlibatan peran serta warga sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan berada pada kategori cukup baik, dengan skor rata-rata 3.58 yang mana sekolah perlu memperhatikan dan melaksanakan lebih optimal agar pengelolaan pada kegiatan tertentu yang ditetapkan ini dapat lebih baik lagi.

Dapat dilihat bahwa skor rata-rata tertinggi dari aspek keterlibatan peran serta warga sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan adalah masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam kegiatan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan sekolah dengan skor rata-rata 3.81. Sedangkan skor rata-rata terendah dari aspek keterlibatan peran serta warga sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan

tertentu yang ditetapkan adalah merencanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang belum terprogram di sekolah dengan skor rata-rata 3.44.

Kegiatan tertentu yang ditetapkan sekolah yakni studi banding. Studi Banding (comparison study) adalah sebuah konsep belajar yang dilakukan di lokasi dan lingkungan berbeda yang merupakan kegiatan yang lazim dilakukan untuk maksud peningkatan mutu, perluasan usaha, perbaikan sistem, penentuan kebijakan baru, perbaikan peraturan perundangan, dan lain-lain.

Langkah yang dapat ditempuh agar semakin optimalnya keterlaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut maka dalam merencanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang belum terprogram ini agar lebih di persiapkan secara komprehensif atau menyeluruh walaupun bukan merupakan agenda wajib sekolah namun tetap dapat terealisasikan dengan baik.

5. Masyarakat Setiap sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output dan pemanfaatan lulusan

Hasil penelitian pada tabel 8 menunjukkan bahwa Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat Di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara dilihat dari aspek setiap sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output dan pemanfaatan lulusan berada pada kategori baik dengan skor rata-rata 3.85. yang mana sekolah dalam hal ini harus dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan hubungan kemitraan dengan

lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output dan pemanfaatan lulusan agar bisa menjadi lebih baik lagi.

Kemitraan itu diartikan sebagai suatu hubungan untuk menjalin kerjasama. Secara etimologi menurut Widodo (2002:441), kata kemitraan berasal dari kata mitra yang artinya pasangan kerja, atau partner usaha. Mitra, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya teman, sahabat, kawan kerja. Visual synonym, kamus online memberikan definisi yang sangat bagus mengenai kemitraan. Kemitraan diartikan sebagai hubungan kooperatif antara orang atau kelompok orang yang sepakat untuk berbagi tanggung jawab untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan.

6. Masyarakat Kemitraan sekolah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah

Hasil penelitian pada tabel 9 menunjukkan bahwa Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat Di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara dilihat dari aspek kemitraan sekolah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah berada pada kategori baik dengan skor rata-rata 4.05.

Kemitraan adalah adanya keinginan untuk berbagi tanggung jawab yang diwujudkan melalui perilaku hubungan dimana semua pihak yang terlibat saling bantu-membantu untuk mencapai tujuan bersama.. Masing-masing pihak yang bermitra memiliki posisi dan tanggung jawab yang sama. Masing-masing menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan tugas dan batas-batas wewenang yang dimiliki. Dengan kategori baik yang diperoleh, sekolah harus mampu untuk mempertahankan dan lebih

meningkatkan kemitraan sekolah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah agar bisa menjadi lebih baik lagi.

7. Kemitraan SMP atau yang setara dilakukan minimal dengan SMA atau yang setara, serta dunia usaha dan dunia industri

Hasil penelitian pada tabel 10 menunjukkan bahwa Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat Di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara dilihat dari aspek Kemitraan SMP atau yang setara dilakukan minimal dengan SMA atau yang setara, serta dunia usaha dan dunia industri berada pada kategori baik dengan skor rata-rata 3.76.

Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dalam modul pemberdayaan Komite Sekolah menjelaskan bahwa yang dimaksud kemitraan dalam konteks hubungan resiprokal antara sekolah, masyarakat kemitraan bukan sekedar sekumpulan aturan main yang tertulis dan formal atau suatu kontrak kerja melainkan lebih menunjukkan perilaku hubungan yang bersifat intim antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama dengan Dunia Usaha/ Dunia Industri yaitu saling membantu, saling mengisi dan saling melengkapi untuk meraih keuntungan bersama.

Dengan kategori baik yang diperoleh, sekolah harus mampu untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan kemitraan SMP atau yang setara dilakukan minimal dengan SMA atau yang setara, serta dunia usaha dan dunia industri agar bisa menjadi lebih baik lagi.

8. Sistem kemitraan sekolah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis

Hasil penelitian pada tabel 11 menunjukkan bahwa Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat Di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara dilihat dari aspek sistem kemitraan sekolah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis berada pada kategori baik dengan skor rata-rata 3.81. yang mana sekolah harus mampu untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pengelolaan bidang hubungan masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan agar bisa menjadi lebih baik lagi.

Pengertian Perjanjian Kerjasama dapat kita lihat yaitu Suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus (*Black's Law Dictionary*). Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada pihak lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Melalui perjanjian terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing masing pihak yang membuat perjanjian. Sebuah sekolah tidak akan bisa sukses tanpa kerjasama dengan lembaga lain. Karena kerjasama yang direncanakan matang akan meningkatkan pengalaman belajar siswa di dunia nyata atau membuat sebuah kegiatan di sekolah makin bermakna dan surat perjanjian juga

dapat dijadikan acuan ketika menggugat seseroang yang melanggar kesepakatan yang telah dibuat dalam surat perjanjian tersebut.

Dengan kategori baik yang diperoleh, sekolah harus mampu untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan sistem kemitraan sekolah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis agar bisa menjadi lebih baik lagi.

9. Rekapitulasi Data Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara

Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara di tinjau dari aspek sekolah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah dalam pengelolaan pendidikan, warga sekolah dilibatkan dalam pengelolaan akademik, masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam pengelolaan non-akademik, keterlibatan peran serta warga sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan, setiap sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dnegan input, proses, output dan pemanfaatan lulusan, kemitraan sekolah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah, kemitraan SMP atau yang setara dilakukan minimal dengan SMA yang setara, serta dunia usaha dan dunia industri, dan sistem kemitraan sekolah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis memiliki skor 3.81 dalam kategori baik dan dapat dikatakan sudah terlaksana dengan baik.

Skor rata-rata tertinggi tentang persepsi pegawai tentang Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat di SMP

Negeri Kecamatan Padang Utara terdapat pada kemitraan sekolah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah dengan skor rata-rata 4.05 dalam kategori baik, sedangkan skor rata-rata terendah adalah keterlibatan peran serta warga sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan dengan skor rata-rata 3.58 dalam kategori cukup baik.

Jadi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara yang di tinjau dari aspek sekolah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah dalam pengelolaan pendidikan, warga sekolah dilibatkan dalam pengelolaan akademik, masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam pengelolaan non-akademik, keterlibatan peran serta warga sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan, setiap sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output dan pemanfaatan lulusan, kemitraan sekolah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah, kemitraan SMP atau yang setara dilakukan minimal dengan SMA atau yang setara, serta dunia usaha dan dunia industri, dan sistem kemitraan sekolah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis, bisa dikatakan sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan angket yang diisi oleh Tenaga Pendidik dan Kependidikan di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara. Untuk itu masih perlunya peningkatan dalam pelaksanaan standar pengelolaan bidang hubungan masyarakat yang dilakukan pihak

sekolah dalam mencapai kategori sangat baik dan agar pelaksanaan pengelolaan Hubungan Masyarakat di Sekolah terlaksana dengan semestinya.

10. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa antara fenomena dengan hasil penelitian ternyata tidak seluruhnya terbukti dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan karena saat melakukan pengamatan penulis tidak menggunakan alat ukur, sehingga fenomena yang penulis buat pada latar belakang masalah hanya diperoleh dari hasil pengamatan saja tanpa didukung oleh alat ukur. Selain itu, saat penyebaran angket terkadang responden mengisi angket tidak serius dan hanya asal-asalan saja tanpa memperhatikan pernyataan sesuai dengan keadaan dilapangan, ada juga responden yang berdiskusi saat mengisi angket sehingga angket yang diisi tidak sesuai dengan pengalaman yang dialami responden serta masih adanya responden yang menutupi keadaan yang sebenarnya sehingga responden mengisi angket tidak secara jujur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara ” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara dari aspek sekolah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah dalam pengelolaan pendidikan. berada pada kategori cukup baik dengan skor rata-rata 3.60.
2. Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara dari aspek warga sekolah dilibatkan dalam pengelolaan akademik. berada pada kategori baik dengan skor rata-rata 3.88.
3. Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara dari aspek masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam pengelolaan non-akademik pada kategori baik dengan skor rata-rata 3.92.
4. Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara dari aspek keterlibatan peran serta warga sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan berada pada kategori cukup baik dengan skor rata-rata 3.58.

5. Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara dari aspek setiap sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output dan pemanfaatan lulusan pada kategori baik dengan skor rata-rata 3.85.
6. Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara dari aspek kemitraan sekolah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah pada kategori baik dengan skor rata-rata 4.05.
7. Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara dari aspek kemitraan SMP atau yang setara dilakukan minimal dengan SMA atau yang setara, serta dunia usaha dan dunia industri pada kategori baik dengan skor rata-rata 3.76.
8. Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara dari aspek Sistem kemitraan sekolah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis pada kategori baik dengan skor rata-rata 3.81.

Hal ini membuktikan bahwa Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat di SMP Negeri Kecamatan Padang sudah terlaksana dengan baik, namun belum sempurna dan diharapkan lebih ditingkatkan lagi di masa yang akan datang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat di pertimbangkan sebagai berikut:

1. Pada indikator pertama yaitu yang mendapat skor terendah adalah keterlibatan warga dan masyarakat pendukung dilibatkan dalam memantau pelaksanaan program kerja sekolah. Pihak sekolah dalam melaksanakan berbagai kegiatan, khususnya dalam mengelola pendidikan tetap bersifat transparansi dan juga dalam melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah ataupun sekedar meminta masukan, saran, ataupun ide-ide yang membuat warga dan masyarakat pendukung sekolah juga merasa berpartisipasi dalam jalannya kegiatan mengelola pendidikan di sekolah.
2. Pada indikator kedua yaitu yang mendapat skor terendah adalah menyusun kalender akademik. Sekolah yang merupakan wadah bagi seluruh warga sekolah bisa lebih saling berkolaborasi dan bekerja sama dalam mengelola kegiatan pendidikan untuk kemajuan sekolah khususnya disini dalam menyusun kalender akademik sekolah agar dilakukan secara bersama-sama dan melibatkan seluruh warga sekolah yang ada.
3. Pada indikator ketiga yaitu yang mendapat skor terendah adalah masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam pelaksanaan program non akademik/ ekstrakurikuler dan memantau pelaksanaan program non akademik/ ekstrakurikuler. Sebaiknya pihak sekolah tidak hanya melibatkan warga sekolah saja namun juga ikut melibatkan masyarakat pendukung sekolah dalam melaksanakan program non akademik dan juga

ikut membantu dalam mengawasi jalannya pelaksanaan program non akademik ini sesuai tupoksinya masing-masing.

4. Pada indikator keempat yaitu yang mendapat skor terendah adalah merencanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang belum terprogram di sekolah. Sebaiknya pihak sekolah merencanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang belum terprogram ini agar lebih di persiapkan secara komprehensif atau menyeluruh walaupun bukan merupakan agenda wajib sekolah namun tetap dapat terealisasikan dengan baik dan semakin optimalnya keterlaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut.
5. Pada indikator kelima yaitu yang mendapat skor terendah adalah sekolah menjalin kerjasama dengan lembaga bimbingan belajar untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Sebaiknya pihak sekolah lebih menjalin kerjasama dengan lembaga bimbingan belajar lebih luas lagi, karna hal ini dapat membantu siswa dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran disekolah.
6. Pada indikator keenam yaitu yang mendapat skor terendah adalah sekolah menjalin kerjasama dengan pihak industri komunikasi guna kemajuan sekolah di mata publik. Pihak sekolah sebaiknya melakukan kerjasama dengan pihak industri komunikasi atau media untuk mempromosikan ataupun mengenalkan sekolah agar terciptanya citra yang baik di mata publik.
7. Pada indikator ketujuh yaitu yang mendapat skor terendah adalah Sekolah menjalin kerjasama dengan pihak asuransi tertentu guna menjaga masa

depan peserta didik secara fisik dan financial. Pihak sekolah sebaiknya menjalin kerjasama dengan pihak asuransi, dengan begitu siswa lebih merasa aman, nyaman dan tentram dalam memperoleh pendidikan bahkan untuk dimasa yang akan datang.

8. Pada indikator kedelapan yaitu yang mendapat skor terendah adalah sekolah melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan menggunakan surat perjanjian tertulis secara resmi. Sebaiknya pihak sekolah melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Dengan begitu semua mengenai kesehatan di sekolah, seperti organisasi Palang Merah Remaja (PMR), Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan lainnya dapat terbantu dengan tenaga ahli yang professional sesuai bidangnya.
9. Penulis menyarankan kepada peneliti lanjutan untuk menelaah serta meneliti lebih lanjut tentang Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat dengan tempat penelitian yang berbeda sehingga dapat dijadikan bahan rujukan oleh peneliti-peneliti yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, Ida Fitria. (2014). *Program Hubungan Masyarakat Dalam Menarik Minat Calon Peserta Didik Di Smk Binawiyata Srandakan*. Skripsi.
- Asmani, Jamal Ma'mur. (2015). *Manajemen Efektif Marketing Sekolah, Strategi Menerapkan Jiwa Kompetensi dan Sportifitas untuk Melahirkan Sekolah Unggulan*. Yogyakarta: Diva Press.
- Fitriana, Dyah Ayu. (2016). *Kinerja Hubungan Masyarakat (Humas) Di Sekolah Menengah Kejuruan Yudya Karya Magelang*. Skripsi.
- Kodrat, Denny. (2013). *Sistem Input, Proses, Output, Outcome Pendidikan Bermutu*. Makalah.
- Muldiyah, Siti. (2011). *Kerjasama Sekolah dengan Masyarakat dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Madrasah Aliyah Jamiyyatul Mubtadi Cibayawak Malingping*. Skripsi.
- Mustari, Mohamad. (2014). *Manajemen pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Zulkarnain. (2010) . *Humas di Lembaga Pendidikan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Noor, Muhammad. (2017). *Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat (Humas) Di Sekolah Islam terpadu (SDIT) Sahabat Alam Palangka Raya*. Tesis.
- Nudin, Burham. (2015). *Manajemen Humas dalam Peningkatan Pengelolaan Pendidikan di SD Muhammadiyah Kadisoka Kalasan Sleman*. Tesis.
- Parhan. (2017). *Manajemen Hubungan Masyarakat Dalam Mengembangkan Lembaga Pendidikan Pesantren*. Tesis.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengertian Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Rahmat, Abdul. (2016). *Manajemen Humas Sekolah*. Yogyakarta: Media Akademi.

- Rohiat. (2012). *Manajemen Sekolah – Teori Dasar dan Praktik*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Saleh, Danisa Maharani. (2018). *Peran Humas dalam Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat di Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Yogyakarta*. Skripsi.
- Setiyowati, Sri. (2015). *Manajemen Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat Di Taman Kanak-Kanak Se- Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman*. Jurnal Pendidikan Manajemen Pendidikan edisi Desember 2015.
- Sholeh, Muhammad. (2014). *Pelaksanaan Program Kerja Humas Dalam Meningkatkan Jumlah Siswa SMK 11 Maret Jakarta Utara*. Skripsi.
- Suryosubroto, B. (2014). *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: PT. RIneka Cipta.
- Umar, Munirwan. (2016). *Manajemen Hubungan Sekolah Dan Masyarakat Dalam Pendidikan*. (Jurnal Edukasi Vol 2, Nomor 1. Januari 2016).

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kisi-kisi Instrumen Penelitian

KISI-KISI INSTRUMEN UJI COBA PENELITIAN

Judul: Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara.

Variabel	Indikator	Sub indikator	No Item	Jumlah
Standar Pengelolaan HUMAS	1. Sekolah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah dalam pengelolaan pendidikan.	1. Sekolah melibatkan warga dalam pengelolaan pendidikan	1-10	10
	2. Warga sekolah dilibatkan dalam pengelolaan akademik.	1. Keterlibatan warga sekolah dalam pengelolaan akademik	11-19	9
	3. Masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam pengelolaan non-akademik.	1. Keterlibatan masyarakat pendukung sekolah dalam pengelolaan non-akademik	20-27	7
	4. Keterlibatan peran serta warga sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan	1. Keterlibatan warga sekolah pada kegiatan tertentu yang ditetapkan	28-33	6
	5. Setiap sekolah menjalin kemitraan	1. Kemitraan berkaitan	34-38	5

	dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output dan pemanfaatan lulusan	dengan Input		
		2. Kemitraan berkaitan dengan Proses		
		3. Kemitraan berkaitan dengan Output		
		4. Kemitraan berkaitan dengan Pemanfaatan Lulusan		
	6. Kemitraan sekolah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah	1. Kemitraan dengan Lembaga Pemerintah	39-46	8
		2. Kemitraan dengan Lembaga non-pemerintah		
	7. Kemitraan SMP/MTs/SMPLB atau yang setara dilakukan minimal dengan SMA/SMK/SMALB, MA/MAK, SD/MI atau yang setara, serta dunia usaha dan dunia industry	1. Kemitraan dengan Sekolah Menengah Atas	47-50	4
		2. Kemitraan dengan dunia usaha		
		3. Kemitraan dengan dunia industri		
	8. Sistem kemitraan sekolah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis	1. Perjanjian Kerjasama secara tertulis	51-63	12

Lampiran 2 : Angket Uji Coba Penelitian

PENGANTAR ANGKET UJI COBA PENELITIAN

Kepada

Yth Bapak/Ibu Pegawai di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara

Di Tempat

Dengan Hormat,

Terlebih dahulu penulis mendo'akan semoga Bapak/Ibu berada dalam keadaan sehat wal'afiat dan sukses dalam melaksanakan tugasnya. Penulis sangat menyadari Bapak/Ibu mempunyai tugas yang cukup berat dan sangat sibuk dalam menjalankan tugas rutin di sekolah. Namun, disela-sela kesibukan tersebut penulis mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk membantu penulis dengan sedikit meluangkan waktu Bapak/Ibu untuk dapat mengisi angket yang sederhana ini. Angket yang penulis edarkan ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang "Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara".

Informasi yang diperoleh semata-mata untuk kepentingan ilmiah dalam rangka penyelesaian penyusunan skripsi, dan tidak ada maksud lain yang dapat merugikan Bapak/Ibu maupun sekolah terkait. Oleh sebab itu, sudilah kiranya Bapak/Ibu memberikan informasi sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Selanjutnya data dan informasi yang Bapak/Ibu berikan akan dijaga kerahasiaannya.

Atas kesediaan dan bantuan Bapak/Ibu dalam mengisi angket ini sebelum dan sesudahnya penulis mengucapkan terima kasih.

Padang, Oktober 2019
Hormat Saya,

Meissy Amelia Azahra

PETUNJUK PENGISIAN UJI COBA ANGKET

Angket ini dibuat dalam bentuk pernyataan dan masing-masing pernyataan disediakan 5 alternatif pilihan jawaban. Pilihan jawaban tersebut tersusun dalam bentuk : Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Sangat tidak setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS) untuk variabel kualitas pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan.

Kepada Bapak/Ibu diminta untuk memilih salah satu jawaban yang dianggap cocok dengan memberikan tanda checklist (√) pada tempat yang telah disediakan. Contoh pengisian angket adalah sebagai berikut :

Nama Lembaga :

Jabatan :

Pendidikan terakhir :

No	Butir Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Bapak/ibu berpartisipasi terhadap kegiatan perlombaan di sekolah dalam bentuk financial	√				

Atas kesediaan dan bantuan yang Bapak/Ibu berikan terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih.

Padang, 2019

Meissy Amelia Azahra
Nim/BP: 15002064/2015

ANGKET UJI COBA PENELITIAN

Judul: Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara.

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
A. Sekolah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah dalam pengelolaan pendidikan.						
1. Sekolah melibatkan warga dalam pengelolaan pendidikan						
1.	Bapak dan ibu dilibatkan dalam menyusun rencana pengembangan sekolah untuk 4/5 tahun					
2.	Bapak dan ibu dilibatkan dalam menyusun rencana kerja tahunan sekolah					
3.	Bapak dan ibu dilibatkan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran sekolah					
4.	Bapak dan ibu dilibatkan dalam menyusun rencana pelaksanaan program kerja sekolah					
5.	Keterlibatan bapak dan ibu dalam perencanaan sekolah adalah : (Boleh pilih lebih dari satu di bawah ini)					
	a. Sebagai anggota tim perencanaan					
	b. Diminta masukan ide/gagasan melalui rapat resmi					
	c. Diminta masukan ide/gagasan melalui daftar isian					
6.	d. Diminta masukan ide/gagasan secara informal					
	Bapak/ibu dilibatkan menentukan organisasi/tim/orang-orang yang akan melaksanakan program kerja sekolah					
7.	Bapak dan ibu dalam pelaksanaan program sekolah dalam bentuk : (Boleh pilih lebih dari satu di bawah ini)					
	a. Sebagai anggota tim pelaksana					
	b. Memberi masukan ide/dukungan pemikiran					

	c. Memberikan dukungan dana					
8.	Bapak dan ibu dilibatkan dalam memantau pelaksanaan program kerja sekolah					
9.	Bapak dan ibu dilibatkan dalam menilai keterlaksanaan / keberhasilan program kerja sekolah					
10.	Keterlibatan bapak dan ibu dalam mengevaluasi program kerja sekolah adalah : (Boleh pilih lebih dari satu di bawah ini)					
	a. Anggota tim pengawas / pengendali					
	b. Memberi masukan / ide secara formal dalam rapat atau pertemuan					
	c. Memberikan dukungan dana					
	d. Melakukan pengendalian / pengawasan informal					
B. Warga sekolah dilibatkan dalam pengelolaan akademik						
11.	Bapak dan ibu dilibatkan dalam menyusun kalender akademik					
12.	Bapak dan ibu dilibatkan dalam mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau sekolah					
13.	Bapak dan ibu dilibatkan dalam menentukan pembagian tugas mengajar guru					
14.	Bapak dan ibu dilibatkan dalam penyusunan jadwal pembelajaran					
15.	Bapak dan ibu dilibatkan dalam pengembangan perangkat pembelajaran					
16.	Bapak dan ibu dilibatkan dalam memantau pelaksanaan program akademik					
17.	Bapak dan ibu dilibatkan dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program akademik					
18.	Bapak dan ibu dilibatkan dalam melaksanakan tindak lanjut dari hasil pengawasan bidang akademik					
19.	Bentuk keterlibatan bapak dan ibu dalam pengelolaan program akademik adalah : (Boleh pilih lebih dari satu di bawah ini)					
	a. Sebagai anggota tim perencana					

	b. Sebagai pelaksana program akademik					
	c. Memberi ide/ masukan melalui forum formal / resmi					
	d. Memberi ide / masukan secara informal					
	e. Memberikan dukungan dana					
C. Masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam pengelolaan non-akademik.						
20.	Masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam mengembangkan ekstrakurikuler sekolah					
21.	Masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam menentukan pembagian tugas guru dalam membimbing siswa pada kegiatan ekstrakurikuler					
22.	Masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam penyusunan jadwal kegiatan ekstrakurikuler					
23.	Masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam pelaksanaan program non akademik / ekstrakurikuler					
24.	Masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam memantau pelaksanaan program non akademik / ekstrakurikuler					
25.	Masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program non akademik / ekstrakurikuler					
26.	Masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam melaksanakan tindak lanjut dari hasil pengawasan bidang non akademik / ekstrakurikuler					
27.	Bentuk keterlibatan Masyarakat pendukung sekolah dalam pengelolaan program non akademik adalah : (Boleh pilih lebih dari satu di bawah ini)					
	a. Sebagai anggota tim perencana					
	b. Sebagai pelaksana program non akademik					
	c. Memberi ide/masukan melalui forum formal / resmi					
	d. Memberi ide / masukan secara informal					

	e. Memberikan dukungan dana					
D. Keterlibatan peran serta warga sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan.						
28.	Bapak dan ibu dilibatkan dalam merencanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang belum terprogram di sekolah					
29.	Bapak/ibu dilibatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu di sekolah					
30.	Bapak/ibu dilibatkan dalam kegiatan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan sekolah					
31.	Masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam merencanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang belum terprogram di sekolah					
32.	Masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu di sekolah					
33.	Masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam kegiatan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan sekolah					
E. Setiap sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output, dan pemanfaatan lulusan						
1. Kemitraan berkaitan dengan Input						
34.	Sekolah menjalin kerjasama dengan SD/MI/setara untuk mempersiapkan calon peserta didik pada tahun ajaran baru					
2. Kemitraan berkaitan dengan Proses						
35.	Sekolah menjalin kerjasama dengan lembaga bimbingan belajar untuk meningkatkan kualitas belajar siswa					
36.	Sekolah menjalin kerjasama dengan SMP/Mts/setara untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang telah diprogramkan					
37.	Sekolah menjalin kerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) untuk pemetaan mutu pendidikan					
3. Kemitraan berkaitan dengan Pemanfaatan Lulusan						
38.	Sekolah menjalin kerjasama dengan					

	SMA/SMK/setara untuk melanjutkan pendidikan kejenjang berikutnya					
F. Kemitraan sekolah dilakukan dengan lembaga pemerintah/non pemerintah						
1. Kemitraan dengan Lembaga Pemerintah						
39.	Sekolah menjalin kerjasama dengan lembaga Dinas Pendidikan dalam membantu pengelolaan sekolah					
40.	Sekolah menjalin kerjasama dengan lembaga Dinas Pemuda dan Olahraga dalam membantu mengelola non-akademik / ekstrakurikuler sekolah					
41.	Sekolah menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam rangka mengembangkan kemampuan siswa bidang Palang Merah Remaja					
42.	Sekolah menjalin kerjasama dengan Kepolisian untuk mensosialisasikan tentang narkoba dan tata tertib lalu lintas					
2. Kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah						
43.	Sekolah menjalin kerjasama dengan pihak industri komunikasi guna kemajuan sekolah di mata publik					
44.	Sekolah menjalin kerjasama dengan ikatan alumni sekolah guna menjalin silaturahmi antara alumni dengan sekolah					
45.	Sekolah menjalin kerjasama dengan bimbingan belajar untuk meningkatkan pengetahuan siswa					
46.	Sekolah menjalin kerja sama dengan Lembaga Test Psikologi/Test IQ dalam rangka mengarahkan siswa untuk memilih minat/jurusan pada jejang pendidikan selanjutnya					
G. Kemitraan SMP/MTs/SMPLB atau yang setara dilakukan minimal dengan SMA/SMK/SMALB, MA/MAK, SD/MI atau yang setara serta dunia usaha dan dunia industri.						
1. Kemitraan dengan Dunia Usaha						
47.	Sekolah menjalin kerjasama dengan usaha makanan agar mempermudah mensupply					

	makanan yang aman untuk di konsumsi oleh siswa di sekolah					
2. Kemitraan dengan Dunia Industri						
48.	Sekolah menjalin kerjasama dengan pihak asuransi tertentu guna menjaga masa depan peserta didik secara fisik dan financial					
49.	Sekolah menjalin kerjasama dengan pihak konveksi dalam menyediakan seragam dan atribut sekolah untuk siswa agar lebih ekonomis					
50.	Sekolah menjalin kerjasama dengan distributor buku pelajaran ataupun buku tulis untuk ketersediaan buku-buku di sekolah					
H. Sistem kemitraan sekolah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis						
1. Perjanjian Kerjasama secara Tertulis						
51.	Sekolah melakukan kerjasama dengan SD/MI/setara menggunakan surat perjanjian tertulis secara resmi					
52.	Sekolah melakukan kerjasama dengan SMA/MA/SMK/setara menggunakan surat perjanjian tertulis secara resmi					
53.	Sekolah melakukan kerjasama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga menggunakan surat perjanjian tertulis secara resmi					
54.	Sekolah melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan menggunakan surat perjanjian tertulis secara resmi					
55.	Sekolah melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan menggunakan surat perjanjian tertulis secara resmi					
56.	Sekolah melakukan kerjasama dengan industri komunikasi menggunakan surat perjanjian tertulis secara resmi					

57.	Sekolah melakukan kerjasama dengan alumni sekolah menggunakan surat perjanjian tertulis secara resmi					
58.	Sekolah melakukan kerjasama dengan lembaga bimbingan belajar menggunakan surat perjanjian tertulis secara resmi					
59.	Sekolah melakukan kerjasama dengan puskesmas menggunakan surat perjanjian tertulis secara resmi					
60.	Sekolah melakukan kerjasama dengan usaha makanan dan minuman menggunakan surat perjanjian tertulis					
61.	Sekolah melakukan kerjasama dengan asuransi menggunakan surat perjanjian tertulis secara resmi					
62.	Sekolah melakukan kerjasama dengan konveksi pakaian atau atribut peserta didik menggunakan surat perjanjian tertulis secara resmi					
63.	Sekolah melakukan kerjasama dengan pihak distributor buku pelajaran atau buku tulis menggunakan surat perjanjian tertulis secara resmi					

Lampiran 3 : Tabel Analisis Uji Coba

HASIL UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN																																																																								
TABEL ANALISIS UJI COBA ANGET PENELITIAN DARI 10 ORANG RESPONDEN																																																																								
PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN BIDANG HUBUNGAN																																																																								
MASYARAKAT DI SMP NEGERI KECAMATAN PADANG UTARA																																																																								
No	Responden	Butir																																																															Skor	Kadrat	Skor	Jumlah	Rank Skor	Rank Skor	D	D2
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	Total	Skor Total	Skor Mak	Skor Mak	Total	Mak		
1	A	3	5	3	5	5	5	4	3	5	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	5	3	5	5	5	4	5	5	285	81225	38	190	3	2	1	1					
2	B	4	5	5	4	4	5	5	4	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	287	82369	36	180	2	3	-1	1					
3	C	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	253	64009	3	15	6	8	-2	4					
4	D	5	4	5	5	5	4	5	3	5	4	4	5	5	4	4	5	3	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	5	4	5	5	3	4	5	4	5	4	5	3	4	5	5	3	4	4	4	3	5	4	3	5	4	3	267	71289	22	110	5	5	0	0						
5	E	4	3	4	5	4	3	5	4	5	4	3	5	4	4	3	4	4	4	3	4	5	4	2	4	3	2	3	2	2	3	5	5	3	4	5	2	5	4	5	4	4	4	5	5	3	4	3	4	4	3	4	4	3	2	4	3	4	229	57121	15	75	7	6	1	1						
6	F	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	5	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	226	51076	1	5	8	9	-1	1							
7	G	2	2	2	3	3	2	3	3	2	3	3	3	2	3	4	3	2	3	3	2	3	2	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	2	2	2	2	2	164	26896	0	0	9	10	-1	1								
8	H	1	2	1	3	3	2	3	5	3	3	2	3	3	3	2	3	4	3	2	3	3	1	3	5	3	3	2	1	1	2	2	2	2	2	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	2	5	1	2	5	3	1	2	3	1	2	162	26244	4	20	10	7	3	9				
9	I	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	301	90601	49	245	1	1	0	0						
10	J	5	4	5	5	3	4	5	2	5	4	5	5	3	4	4	3	4	4	4	4	3	5	5	5	2	5	4	4	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	273	74529	29	145	4	4	0	0						
ΣX		36	37	36	42	40	37	42	35	42	39	38	42	40	39	37	40	40	39	37	40	42	38	42	38	42	39	37	36	38	37	38	37	37	42	42	37	39	42	37	42	38	42	38	39	42	42	37	40	37	39	39	38	39	38	37	39	42	38	42	38	38	2457	625539	985				0	18		
ΣX^2		146	149	146	184	166	149	184	131	184	155	156	184	166	155	149	166	162	155	149	166	184	162	184	156	184	155	149	146	162	149	156	149	146	184	149	155	184	149	184	152	182	156	155	182	184	149	164	149	155	155	156	161	162	149	155	182	162	156	182	162	156	156	11089								
ΣX^3		1296	1369	1296	1764	1600	1369	1764	1225	1764	1521	1444	1764	1600	1521	1369	1600	1600	1521	1369	1600	1764	1444	1764	1444	1764	1521	1369	1296	1444	1369	1369	1764	1369	1369	1521	1764	1369	1521	1764	1444	1444	1764	1600	1369	1600	1369	1521	1521	1444	1444	1444	1444	1444	1444	1444	1444	1444	1444	1444	1444	1444	96085									
Varian Butir		1.64	1.21	1.64	0.76	0.6	1.21	0.76	0.85	0.76	0.29	1.16	0.76	0.6	0.29	1.21	0.6	0.76	1.76	0.76	1.16	1.16	0.76	1.16	1.16	0.76	1.16	1.21	1.01	0.76	0.76	0.29	0.76	1.21	0.76	0.76	0.56	1.16	0.29	0.56	0.76	1.21	0.4	1.21	0.29	0.29	1.16	0.89	1.76	1.21	0.29	0.56	1.76	1.16	0.56	1.76	1.16	1.16	58.05													

Lampiran 4 : Analisis Hasil Uji Coba Angket Penelitian

Analisis Hasil Uji Coba Angket Penelitian

Analisis hasil uji coba instrumen penelitian untuk mengetahui Validitas dan Reliabilitas sebagai berikut:

A. Uji Validitas Angket Uji Coba Penelitian

Uji Validitas Angket dengan menggunakan Rumus Korelasi Tata Jenjang Spearman oleh Arikunto (2010:321):

$$Rho_{xy} = 1 - \frac{6 \sum D^2}{N(N^2 - 1)}$$

Keterangan :

Rho = Validitas yang dicari

$\sum D^2$ = Jumlah differensiasi (daya beda skor maksimal dengan skor total)

N = Jumlah responden

Tabel Perhitungan Validitas dengan Rumus Korelasi Tata Jenjang

No	Responden	Skor Total	Kuadrat Skor Total	Skor Max	Jumlah Skor Max	Rank Skor Total	Rank Skor Max	D	D ²
1	A	285	81225	38	190	3	2	1	1
2	B	287	82369	36	180	2	3	-1	1
3	C	253	64009	3	15	6	8	-2	4
4	D	267	71289	22	110	5	5	0	0
5	E	239	57121	15	75	7	6	1	1
6	F	226	51076	1	5	8	9	-1	1
7	G	164	26896	0	0	9	10	-1	1
8	H	162	26244	4	20	10	7	3	9
9	I	301	90601	49	245	1	1	0	0
10	J	273	74529	29	145	4	4	0	0

Jumlah	2457	625359		985				18
---------------	-------------	---------------	--	------------	--	--	--	-----------

Perhitungan Validitas angket sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Rho_{xy} &= \left[1 - \frac{6 \sum D^2}{N(N^2 - 1)} \right] \\
 &= \left[1 - \frac{6 (18)}{10(10^2 - 1)} \right] \\
 &= 1 - 0,109 \\
 &= \mathbf{0,891}
 \end{aligned}$$

Jadi dari hasil perhitungan validitas di atas dapat diperoleh rho hitung = **0,891** sedangkan rho tabel dengan N = 10 pada taraf kepercayaan 95% adalah 0,648. Jadi rho hitung > rho tabel yaitu **0,891 > 0,648** maka instrument penelitian ini adalah **valid**.

B. Uji Reliabilitas Angket Uji Coba Penelitian

Sedangkan untuk mencari reliabilitas angket, penulis menggunakan rumus Alpha, yang dikemukakan Arikunto (2010:239) karena butir soal pernyataan berbentuk soal uraian.

$$r_{11} = \left(\frac{k}{(k-1)} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma_t^2} \right)$$

Keterangan: r_{11} = Reliabilitas instrumen

k = Banyaknya butir pertanyaan

$\sum \sigma_i^2$ = Jumlah varians skor tiap-tiap item

$$\sigma_t^2 = \text{Varians total}$$

Adapun langkah-langkah untuk menganalisis reliabilitas angket sebagai berikut:

Langkah Pertama (1)

Menghitung varians masing-masing item ($\sum \sigma_i^2$)

Jumlah varian total dihitung dengan rumus Arikunto (2010:240)

$$\sigma^2 = \frac{\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{n}}{n}$$

Keterangan :

σ^2 = Varians yang dicari

x = Skor jawaban masing-masing responden

n = Jumlah responden

Contoh perhitungan varians item

$\sigma 1^2$	=	$\frac{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{N}}{N}$	=	$\frac{146 - \frac{(36)^2}{10}}{10}$	=	$\frac{146 - 129,6}{10}$	=	1,64
$\sigma 2^2$	=	$\frac{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{N}}{N}$	=	$\frac{149 - \frac{(37)^2}{10}}{10}$	=	$\frac{149 - 136,9}{10}$	=	1,21
$\sigma 3^2$	=	$\frac{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{N}}{N}$	=	$\frac{146 - \frac{(36)^2}{10}}{10}$	=	$\frac{146 - 129,6}{10}$	=	1,64
$\sigma 4^2$	=	$\frac{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{N}}{N}$	=	$\frac{184 - \frac{(42)^2}{10}}{10}$	=	$\frac{184 - 176,4}{10}$	=	0,76
$\sigma 5^2$	=	$\frac{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{N}}{N}$	=	$\frac{166 - \frac{(40)^2}{10}}{10}$	=	$\frac{166 - 160}{10}$	=	0,6
$\sigma 6^2$	=	$\frac{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{N}}{N}$	=	$\frac{149 - \frac{(37)^2}{10}}{10}$	=	$\frac{149 - 136,9}{10}$	=	1,21
$\sigma 7^2$	=	$\frac{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{N}}{N}$	=	$\frac{184 - \frac{(42)^2}{10}}{10}$	=	$\frac{184 - 176,4}{10}$	=	0,76
$\sigma 8^2$	=	$\frac{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{N}}{N}$	=	$\frac{131 - \frac{(35)^2}{10}}{10}$	=	$\frac{131 - 122,5}{10}$	=	0,85

σ_9^2	=	$\frac{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{N}}{N}$	=	$\frac{184 - \frac{(42)^2}{10}}{10}$	=	$\frac{184 - 176,4}{10}$	=	0,76
σ_{10}^2	=	$\frac{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{N}}{N}$	=	$\frac{155 - \frac{(39)^2}{10}}{10}$	=	$\frac{155 - 152,1}{10}$	=	0,29
Dan seterusnya s/d item 63 dapat dilihat pada tabel rekapitulasi analisis uji coba angket								

Langkah kedua (2)

Menjumlahkan varians semua item ($\sum \sigma_b^2$)

$$\sum \sigma_b^2 = \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 + \sigma_4 + \sigma_5 + \dots + \sigma_{63}$$

$$\begin{aligned}
 &1,64 + 1,21 + 1,64 + 0,76 + 0,6 + 1,21 + 0,76 + 0,85 + 0,476 + 0,29 + \\
 &1,16 + 0,76 + 0,6 + 0,29 + 1,21 + 0,6 + 0,2 + 0,29 + 1,21 + 0,6 + \\
 &0,76 + 1,76 + 0,76 + 1,16 + 0,76 + 0,29 + 1,21 + 1,64 + 1,76 + 1,21 + \\
 &1,16 + 1,21 + 1,21 + 1,01 + 0,76 + 0,76 + 1,21 + 0,29 + 0,76 + 1,21 + \\
 &0,76 + 0,76 + 0,56 + 1,16 + 0,29 + 0,56 + 0,76 + 1,21 + 0,4 + 1,21 + \\
 &0,29 + 0,29 + 1,16 + 0,89 + 1,76 + 1,21 + 0,29 + 0,56 + 1,76 + 1,16 + \\
 &0,56 + 1,76 + 1,16 = \mathbf{58,05}
 \end{aligned}$$

Langkah Ketiga (3)

Mencari analisis tiap item dengan menggunakan rumus varians total ($\sum \sigma_t^2$)

$$\begin{aligned}
 \sum \sigma_t^2 &= \frac{\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{N}}{N} \\
 &= \frac{625359 - \frac{(2457)^2}{10}}{10} \\
 &= \frac{625359 - 603684,9}{10} \\
 &= \frac{21674,1}{10} = \mathbf{2167,41}
 \end{aligned}$$

Langkah Keempat (4)

Mencari reliabilitas instrument dengan menggunakan rumus Alpha:

$$\begin{aligned}
 r_{11} &= \left(\frac{k}{(k-1)} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma_t^2} \right) \\
 &= \left(\frac{63}{63-1} \right) \left(1 - \frac{58,05}{2167,41} \right) \\
 &= \left(\frac{63}{62} \right) (1 - 0,026) \\
 &= (1,01)(0,974) \\
 &= \mathbf{0,983}
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan reliabilitas diperoleh r hitung = **0,983** dan r tabel dengan taraf kepercayaan 95%, dengan N = 10 adalah **0,648** (N=10) karena r hitung > r tabel (**0,983 > 0,648**), maka instrument penelitian ini adalah **reliabel**.

Lampiran 5 : Table Nilai-nilai Rho

N	Taraf		N	Signif	
	5%	1%		5%	1%
5	1,000		16	0,506	0,665
6	0,886	1,000	18	0,475	0,626
7	0,786	0,929	20	0,450	0,591
8	0,738	0,881	22	0,428	0,562
9	0,683	0,833	24	0,409	0,537
10	0,648	0,794	26	0,392	0,515
12	0,591	0,777	28	0,377	0,496
14	0,544	0,715	30	0,364	0,478

Lampiran 6 : Nilai-nilai R Product Moment

N	TheLevel of Significance		N	TheLevel of Significance	
	5%	1%		5%	1%
3	0.997	0.999	38	0.320	0.413
4	0.950	0.990	39	0.316	0.408
5	0.878	0.959	40	0.312	0.403
6	0.811	0.917	41	0.308	0.398
7	0.754	0.874	42	0.304	0.393
8	0.707	0.834	43	0.301	0.389
9	0.666	0.798	44	0.297	0.384
10	0.632	0.765	45	0.294	0.380
11	0.602	0.735	46	0.291	0.376
12	0.576	0.708	47	0.288	0.372
13	0.553	0.684	48	0.284	0.368
14	0.532	0.661	49	0.281	0.364
15	0.514	0.641	50	0.279	0.361
16	0.497	0.623	55	0.266	0.345
17	0.482	0.606	60	0.254	0.330
18	0.468	0.590	65	0.244	0.317
19	0.456	0.575	70	0.235	0.306
20	0.444	0.561	75	0.227	0.296
21	0.433	0.549	80	0.220	0.286
22	0.432	0.537	85	0.213	0.278
23	0.413	0.526	90	0.207	0.267
24	0.404	0.515	95	0.202	0.263
25	0.396	0.505	100	0.195	0.256
26	0.388	0.496	125	0.176	0.230
27	0.381	0.487	150	0.159	0.210
28	0.374	0.478	175	0.148	0.194
29	0.367	0.470	200	0.138	0.181
30	0.361	0.463	300	0.113	0.148
31	0.355	0.456	400	0.098	0.128
32	0.349	0.449	500	0.088	0.115
33	0.344	0.442	600	0.080	0.105
34	0.339	0.436	700	0.074	0.097
35	0.334	0.430	800	0.070	0.091
36	0.329	0.424	900	0.065	0.086
37	0.325	0.418	1000	0.062	0.081

Lampiran 7 : Angket Penelitian

ANGKET PENELITIAN

Judul: Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara.

Variabel	Indikator	Sub indikator	No Item	Jumlah
Standar Pengelolaan HUMAS	1. Sekolah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah dalam pengelolaan pendidikan.	1. Sekolah melibatkan warga dalam pengelolaan pendidikan	1-10	10
	2. Warga sekolah dilibatkan dalam pengelolaan akademik.	1. Keterlibatan warga sekolah dalam pengelolaan akademik	11-19	9
	3. Masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam pengelolaan non-akademik.	1. Keterlibatan masyarakat pendukung sekolah dalam pengelolaan non-akademik	20-27	7
	4. Keterlibatan peran serta warga sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan	1. Keterlibatan warga sekolah pada kegiatan tertentu yang ditetapkan	28-33	6
	5. Setiap sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dnegan	1. Kemitraan berkaitan dengan Input	34-38	5
		2. Kemitraan berkaitan		

	input, proses, output dan pemanfaatan lulusan	dengan Proses		
		3. Kemitraan berkaitan dengan Output		
		4. Kemitraan berkaitan dengan Pemanfaatan Lulusan		
	6. Kemitraan sekolah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah	1. Kemitraan dengan Lembaga Pemerintah	39-46	8
		2. Kemitraan dengan Lembaga non-pemerintah		
	7. Kemitraan SMP/MTs/SMPLB atau yang setara dilakukan minimal dengan SMA/SMK/SMALB, MA/MAK, SD/MI atau yang setara, serta dunia usaha dan dunia industry	1. Kemitraan dengan Sekolah Menengah Atas	47-50	4
		2. Kemitraan dengan dunia usaha		
		3. Kemitraan dengan dunia industri		
	8. Sistem kemitraan sekolah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis	1. Perjanjian Kerjasama secara tertulis	51-63	12

PENGANTAR ANGKET PENELITIAN

Kepada

Yth Bapak/Ibu Pegawai di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara

Di Tempat

Dengan Hormat,

Terlebih dahulu penulis mendo'akan semoga Bapak/Ibu berada dalam keadaan sehat wal'afiat dan sukses dalam melaksanakan tugasnya. Penulis sangat menyadari Bapak/Ibu mempunyai tugas yang cukup berat dan sangat sibuk dalam menjalankan tugas rutin di sekolah. Namun, disela-sela kesibukan tersebut penulis mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk membantu penulis dengan sedikit meluangkan waktu Bapak/Ibu untuk dapat mengisi angket yang sederhana ini. Angket yang penulis edarkan ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang "Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara".

Informasi yang diperoleh semata-mata untuk kepentingan ilmiah dalam rangka penyelesaian penyusunan skripsi, dan tidak ada maksud lain yang dapat merugikan Bapak/Ibu maupun sekolah terkait. Oleh sebab itu, sudilah kiranya Bapak/Ibu memberikan informasi sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Selanjutnya data dan informasi yang Bapak/Ibu berikan akan dijaga kerahasiaannya.

Atas kesediaan dan bantuan Bapak/Ibu dalam mengisi angket ini sebelum dan sesudahnya penulis mengucapkan terima kasih.

Padang, Oktober 2019
Hormat Saya,

Meissy Amelia Azahra

PETUNJUK PENGISIAN ANGKET

Angket ini dibuat dalam bentuk pernyataan dan masing-masing pernyataan disediakan 5 alternatif pilihan jawaban. Pilihan jawaban tersebut tersusun dalam bentuk : Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Sangat tidak setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS) untuk variabel kualitas pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan.

Kepada Bapak/Ibu diminta untuk memilih salah satu jawaban yang dianggap cocok dengan memberikan tanda checklist (√) pada tempat yang telah disediakan. Contoh pengisian angket adalah sebagai berikut :

Nama Lembaga :

Jabatan :

Pendidikan terakhir :

No	Butir Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Bapak/ibu berpartisipasi terhadap kegiatan perlombaan di sekolah dalam bentuk financial	√				

Atas kesediaan dan bantuan yang Bapak/Ibu berikan terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih.

Padang, 2019

Meissy Amelia Azahra
Nim/BP: 15002064/2015

ANGKET PENELITIAN

Judul: Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara.

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
A. Sekolah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah dalam pengelolaan pendidikan.						
1. Sekolah melibatkan warga dalam pengelolaan pendidikan						
1.	Bapak dan ibu dilibatkan dalam menyusun rencana pengembangan sekolah untuk 4/5 tahun					
2.	Bapak dan ibu dilibatkan dalam menyusun rencana kerja tahunan sekolah					
3.	Bapak dan ibu dilibatkan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran sekolah					
4.	Bapak dan ibu dilibatkan dalam menyusun rencana pelaksanaan program kerja sekolah					
5.	Keterlibatan bapak dan ibu dalam perencanaan sekolah adalah : (Boleh pilih lebih dari satu di bawah ini)					
	a. Sebagai anggota tim perencanaan					
	b. Diminta masukan ide/gagasan melalui rapat resmi					
	c. Diminta masukan ide/gagasan melalui daftar isian					
6.	d. Diminta masukan ide/gagasan secara informal					
	Bapak/ibu dilibatkan menentukan organisasi/tim/orang-orang yang akan melaksanakan program kerja sekolah					
7.	Bapak dan ibu dalam pelaksanaan program sekolah dalam bentuk : (Boleh pilih lebih dari satu di bawah ini)					
	a. Sebagai anggota tim pelaksana					
	b. Memberi masukan ide/dukungan pemikiran					

	c. Memberikan dukungan dana					
8.	Bapak dan ibu dilibatkan dalam memantau pelaksanaan program kerja sekolah					
9.	Bapak dan ibu dilibatkan dalam menilai keterlaksanaan / keberhasilan program kerja sekolah					
10.	Keterlibatan bapak dan ibu dalam mengevaluasi program kerja sekolah adalah : (Boleh pilih lebih dari satu di bawah ini)					
	a. Anggota tim pengawas / pengendali					
	b. Memberi masukan / ide secara formal dalam rapat atau pertemuan					
	c. Memberikan dukungan dana					
	d. Melakukan pengendalian / pengawasan informal					
B. Warga sekolah dilibatkan dalam pengelolaan akademik						
11.	Bapak dan ibu dilibatkan dalam menyusun kalender akademik					
12.	Bapak dan ibu dilibatkan dalam mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau sekolah					
13.	Bapak dan ibu dilibatkan dalam menentukan pembagian tugas mengajar guru					
14.	Bapak dan ibu dilibatkan dalam penyusunan jadwal pembelajaran					
15.	Bapak dan ibu dilibatkan dalam pengembangan perangkat pembelajaran					
16.	Bapak dan ibu dilibatkan dalam memantau pelaksanaan program akademik					
17.	Bapak dan ibu dilibatkan dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program akademik					
18.	Bapak dan ibu dilibatkan dalam melaksanakan tindak lanjut dari hasil pengawasan bidang akademik					
19.	Bentuk keterlibatan bapak dan ibu dalam pengelolaan program akademik adalah : (Boleh pilih lebih dari satu di bawah ini)					
	a. Sebagai anggota tim perencana					

	b. Sebagai pelaksana program akademik					
	c. Memberi ide/ masukan melalui forum formal / resmi					
	d. Memberi ide / masukan secara informal					
	e. Memberikan dukungan dana					
C. Masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam pengelolaan non-akademik.						
20.	Masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam mengembangkan ekstrakurikuler sekolah					
21.	Masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam menentukan pembagian tugas guru dalam membimbing siswa pada kegiatan ekstrakurikuler					
22.	Masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam penyusunan jadwal kegiatan ekstrakurikuler					
23.	Masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam pelaksanaan program non akademik / ekstrakurikuler					
24.	Masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam memantau pelaksanaan program non akademik / ekstrakurikuler					
25.	Masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program non akademik / ekstrakurikuler					
26.	Masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam melaksanakan tindak lanjut dari hasil pengawasan bidang non akademik / ekstrakurikuler					
27.	Bentuk keterlibatan Masyarakat pendukung sekolah dalam pengelolaan program non akademik adalah : (Boleh pilih lebih dari satu di bawah ini)					
	a. Sebagai anggota tim perencana					
	b. Sebagai pelaksana program non akademik					
	c. Memberi ide/masukan melalui forum formal / resmi					
	d. Memberi ide / masukan secara informal					


	e. Memberikan dukungan dana					
D. Keterlibatan peran serta warga sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan.						
28.	Bapak dan ibu dilibatkan dalam merencanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang belum terprogram di sekolah					
29.	Bapak/ibu dilibatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu di sekolah					
30.	Bapak/ibu dilibatkan dalam kegiatan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan sekolah					
31.	Masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam merencanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang belum terprogram di sekolah					
32.	Masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu di sekolah					
33.	Masyarakat pendukung sekolah dilibatkan dalam kegiatan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan sekolah					
E. Setiap sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output, dan pemanfaatan lulusan						
1. Kemitraan berkaitan dengan Input						
34.	Sekolah menjalin kerjasama dengan SD/MI/setara untuk mempersiapkan calon peserta didik pada tahun ajaran baru					
2. Kemitraan berkaitan dengan Proses						
35.	Sekolah menjalin kerjasama dengan lembaga bimbingan belajar untuk meningkatkan kualitas belajar siswa					
36.	Sekolah menjalin kerjasama dengan SMP/Mts/setara untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang telah diprogramkan					
37.	Sekolah menjalin kerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) untuk pemetaan mutu pendidikan					
3. Kemitraan berkaitan dengan Pemanfaatan Lulusan						
38.	Sekolah menjalin kerjasama dengan					

	SMA/SMK/setara untuk melanjutkan pendidikan kejenjang berikutnya					
F. Kemitraan sekolah dilakukan dengan lembaga pemerintah/non pemerintah						
3. Kemitraan dengan Lembaga Pemerintah						
39.	Sekolah menjalin kerjasama dengan lembaga Dinas Pendidikan dalam membantu pengelolaan sekolah					
40.	Sekolah menjalin kerjasama dengan lembaga Dinas Pemuda dan Olahraga dalam membantu mengelola non-akademik / ekstrakurikuler sekolah					
41.	Sekolah menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam rangka mengembangkan kemampuan siswa bidang Palang Merah Remaja					
42.	Sekolah menjalin kerjasama dengan Kepolisian untuk mensosialisasikan tentang narkoba dan tata tertib lalu lintas					
4. Kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah						
43.	Sekolah menjalin kerjasama dengan pihak industri komunikasi guna kemajuan sekolah di mata publik					
44.	Sekolah menjalin kerjasama dengan ikatan alumni sekolah guna menjalin silaturahmi antara alumni dengan sekolah					
45.	Sekolah menjalin kerjasama dengan bimbingan belajar untuk meningkatkan pengetahuan siswa					
46.	Sekolah menjalin kerja sama dengan Lembaga Test Psikologi/Test IQ dalam rangka mengarahkan siswa untuk memilih minat/jurusan pada jejang pendidikan selanjutnya					
G. Kemitraan SMP/MTs/SMPLB atau yang setara dilakukan minimal dengan SMA/SMK/SMALB, MA/MAK, SD/MI atau yang setara serta dunia usaha dan dunia industri.						
1. Kemitraan dengan Dunia Usaha						
47.	Sekolah menjalin kerjasama dengan usaha makanan agar mempermudah mensupply					

	makanan yang aman untuk di konsumsi oleh siswa di sekolah					
2. Kemitraan dengan Dunia Industri						
48.	Sekolah menjalin kerjasama dengan pihak asuransi tertentu guna menjaga masa depan peserta didik secara fisik dan financial					
49.	Sekolah menjalin kerjasama dengan pihak konveksi dalam menyediakan seragam dan atribut sekolah untuk siswa agar lebih ekonomis					
50.	Sekolah menjalin kerjasama dengan distributor buku pelajaran ataupun buku tulis untuk ketersediaan buku-buku di sekolah					
H. Sistem kemitraan sekolah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis						
1. Perjanjian Kerjasama secara Tertulis						
51.	Sekolah melakukan kerjasama dengan SD/MI/setara menggunakan surat perjanjian tertulis secara resmi					
52.	Sekolah melakukan kerjasama dengan SMA/MA/SMK/setara menggunakan surat perjanjian tertulis secara resmi					
53.	Sekolah melakukan kerjasama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga menggunakan surat perjanjian tertulis secara resmi					
54.	Sekolah melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan menggunakan surat perjanjian tertulis secara resmi					
55.	Sekolah melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan menggunakan surat perjanjian tertulis secara resmi					
56.	Sekolah melakukan kerjasama dengan industri komunikasi menggunakan surat perjanjian tertulis secara resmi					

57.	Sekolah melakukan kerjasama dengan alumni sekolah menggunakan surat perjanjian tertulis secara resmi					
58.	Sekolah melakukan kerjasama dengan lembaga bimbingan belajar menggunakan surat perjanjian tertulis secara resmi					
59.	Sekolah melakukan kerjasama dengan puskesmas menggunakan surat perjanjian tertulis secara resmi					
60.	Sekolah melakukan kerjasama dengan usaha makanan dan minuman menggunakan surat perjanjian tertulis					
61.	Sekolah melakukan kerjasama dengan asuransi menggunakan surat perjanjian tertulis secara resmi					
62.	Sekolah melakukan kerjasama dengan konveksi pakaian atau atribut peserta didik menggunakan surat perjanjian tertulis secara resmi					
63.	Sekolah melakukan kerjasama dengan pihak distributor buku pelajaran atau buku tulis menggunakan surat perjanjian tertulis secara resmi					

Lampiran 9 : Surat Izin Penelitian Jurusan


KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
 Alamat: Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131
 Telephone: 0751-40343 Fax: 0751*-7058693
 Website: <http://fip.unp.ac.id>

Nomor : 611/UN35.1.4.2/AK/2019 07 Oktober 2019
 Lamp : -
 Hal : **Izin Penelitian**
 A.n. Meissy Amelia Azahra


Kepada : Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang
 di
 Tempat

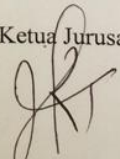
Dengan hormat,
 Dalam rangka penyelesaian studi sdr **A.n. Meissy Amelia Azahra 15002064/2015** Mahasiswa Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNP, akan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi :

Judul Penelitian : Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat di SMP Negeri Kecamatan Padang Utara.
 Objek : Tenaga Pendidik dan Kependidikan
 Tempat Penelitian : SMP Kecamatan Padang Utara
 Dosen Pembimbing : Dra. Anisah, M.Pd
 Mulai Pelaksanaan : 14 Oktober 2019 – 31 Oktober 2019

Sehubungan dengan ini kami mohon kiranya Bapak/Ibuk dapat memberikan izin kepada Mahasiswa tersebut untuk melakukan **Penelitian** di wilayah Bapak/Ibu.

Atas kesediaan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.


Mengetahui,
 Wakil Dekan I FIP UNP

Dr. Hadiyanto, M.Ed
 NIP.19600416198603 1 004

Ketua Jurusan

Drs. Syahril, M.Pd.,Ph.D
 NIP. 19630424 198811 1 001

Tembusan :

1. Dekan FIP (sebagai laporan)
2. Yang bersangkutan
3. Arsip Jurusan

Lampiran 10 : Surat Izin Penelitian Dinas Pendidikan Sumatera Barat



PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Bagindo Azis Chan no. 8 Padang Help. (0751) 21554-21825 fax (0751 21554
Website : HTTP//WWW.disk.Padang.go.id

IZIN PENELITIAN
Nomor: 070/49/ DP.PPMP.01/X/2019

Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang berdasarkan Surat Ketua Jurusan AIP FIP UNP nomor : 611/UN.35.1.4.2/AK/2019 tanggal 7 Oktober 2019 perihal izin penelitian dalam rangka pengambilan data untuk penyelesaian tugas akhir skripsi pada prinsipnya dapat diberikan kepada :

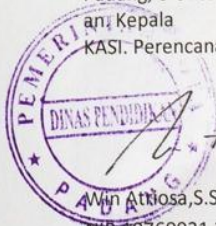
Nama	: MEISSY AMELIA AZAHRA
Nim	: 15002064
Jurusan	: AIP
Prodi	: AIP
Jenjang	: S1
Judul	: PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT DI SMP NEGERI KECAMATAN PADANG UTARA
Lokasi	: 1 . SMPN 7 Padang 2 . SMPN 25 Padang 3 . SMPN 40 Padang
Waktu	: Oktober 2015

Dengan ketentuan :

1. Selama kegiatan berlangsung tidak mengganggu proses belajar mengajar.
2. Setelah melakukan penelitian agar dapat memberikan laporan satu rangkap ke Dinas Pendidikan Kota Padang Cq. Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Padang.
3. Kegiatan tersebut dilaksanakan di dalam jam pelajaran ekstrakurikuler siswa

Demikianlah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 8 Oktober 2015
Kepala
KASI: Perencanaan






Win Atiiosa, S.Si. ME
NIP.19760921 200212 1 010

Tembusan:

1. Walikota Padang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang
3. Ketua Jurusan AIP FIP UNP
4. Kepala SMPN 7 Padang
5. Kepala SMPN 25 Padang
6. Kepala SMPN 40 Padang
7. Arsip

Lampiran 11 : Surat Balasan Penelitian dari SMP Negeri 7 Padang

PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 7 PADANG

Jl. S. Parman Lolong, Padang Telp. (0751)-7055139, Kode Pos: 25136 E-Mail: smp7.padang@yahoo.com Website: www.smpn7padang.sch.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor : 422/371/DP.SMPN 7/2019



Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 Padang dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	MEISSY AMELIA AZAHRA
BP/NIM	:	2015/15002064
Program Study	:	Administrasi Pendidikan
Jenjang	:	Strata Satu (S.1)
PerguruanTinggi	:	Universitas Negeri Padang




Benar telah melaksanakan Penelitian di SMP Negeri 7 Padang dengan Judul Skripsi **"PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT DI SMP NEGERI KECAMATAN PADANG UTARA"** di SMP Negeri 7 Padang, yang dilaksanakan pada Oktober 2019.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 23 Saffar 1441 H
22 Oktober 2019 M

Kepala


P. SYAFRIZAL SYAIR, S.Pd.,MM
 NIP. 19691225 199702 1 004

Lampiran 12 : Surat Balasan Penelitian dari SMP Negeri 25 Padang

PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN
 SEKOLAH ADIWYATA MANDIRI
UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 25 PADANG
 Jalan Beringin Belanti Timur Padang Telp. 8971607. Kode Pos. 25135
 Email : smpn25padang@yahoo.co.id Web: smpn-25pdg.sch.id


SURAT KETERANGAN
Nomor : 423 / 278 / DP.SMP.25 / 2019

Yang bertanda - tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 25 Padang , dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	: MEISSY AMELIA AZAHRA
N I M	: 15002064
Jurusan	: Administrasi Pendidikan
Universitas	: Universitas Negeri Padang

Yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian di SMPN 25 Padang, untuk penyelesaian Tugas Akhir / Skripsi, yang berjudul " **PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT DI SMP NEGERI KECAMATAN PADANG UTARA**".
 Demikianlah surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya .

Padang, 22 Oktober 2019.
 Kepala
 SMPN. 25
 DINAS PENDIDIKAN
 PADANG
SETRIAL S.Pd
 NIP. 19651228 199003 1 002



Lampiran 13 : Surat Balasan Penelitian dari SMP Negeri 40 Padang

PEMERINTAH KOTA PADANG

DINAS PENDIDIKAN

UPT SMP NEGERI 40 PADANG

Jl. Bunda Raya Ulak Karang Utara Padang Telp.(0751)-40444 Kode Pos : 25133

SURAT KETERANGAN
Nomor : 422/431 /DP.SPMN.40/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama / NIP	: Syafril M,S.Pd / 196506051989031009
2. Pangkat	: Pembina / IV/a
3. Jabatan	: Kepala SMP Negeri 40 Padang

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama	: Meissy Amelia Azahra
2. NIM	: 15002064
3. Program Studi	: AIP
4. Jenjang	: S1

Telah selesai melaksanakan penelitian dalam rangka pengumpulan data untuk penyelesaian tugas akhir skripsi pada SMP Negeri 40 Padang pada bulan Oktober 2019 dengan judul "Pelaksanaan Standar Pengelolaan Bidang Hubungan Masyarakat di SMP Negeri Padang Utara"

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Padang, 18 Oktober 2019

Kepala

Syafril.M,S.Pd
NIP. 196506051989031009

